

***COLLABORATIVE GOVERNANCE PENGELOLAAN
SAMPAH DI KELURAHAN TONDO KECAMATAN
MANTIKULORE KOTA PALU***

Oleh

**Fitaqwa Prasni Ramadhan
B10121097**

SKRIPSI

**Dalam Rangka Penulisan Skripsi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TADULAKO
2025**

***COLLABORATIVE GOVERNANCE WASTE
MANAGEMENT IN TONDO VILLAGE MANTIKULORE
DISTRICT PALU CITY***

By
Fitaqwa Prasni Ramadhan
B10121097

THESIS

*In Order to Write a Thesis
To Obtain a Bachelor of Public Administration Degree
At the Faculty of Social and Political Sciences
Tadulako University*



***PUBLIC ADMINISTRATION STUDY PROGRAM
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SCIENCE
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
TADULAKO UNIVERSITY
2025***

HALAMAN PENGESAHAN

COLLABORATIVE GOVERNANCE PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN TONDO KECAMATAN MANTIKULORE KOTA PALU

Oleh

**Fitaqwa Prasni Ramadhan
B 101 21 097**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Tujuan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako**

Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing

Palu,

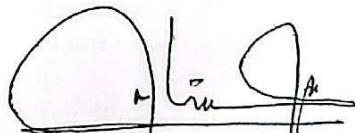
2025

Pembimbing 1



**Dr. Rahmawati Halim, S.Sos., M.Si.
NIP. 197021152001122002**

Pembimbing 2



**Dra. Nurhayati Hamid, M.Si.
NIP. 196710271998022001**



HALAMAN PERSETUJUAN

Diterima dan disetujui oleh panitia Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako untuk memenuhi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Nama : Fitaqwa Prasni Ramadhan
Stambuk : B10121097
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Studi : S1 Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Rabu, 12 November 2025
Judul : Collaborative Governance Pengelolaan Sampah Di Kelurahan
Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu

No	Nama Pengaji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Slamet Riadi, M.Si NIP. 195912311987031252	Ketua	
2	Andi Maman Firmansyah, S.Sos., M.A.P NIP. 199112142020121013	Sekretaris	
3	Dr. Hj. Ani Susanti, S.Sos., M.Si NIP. 197012301998032001	Pengaji Utama	
4	Dr. Rahmawati Halim, S.Sos., M.Si NIP. 197201152001122000	Pembimbing Utama	
5	Dra. Nurhayati Hamid, M.Si NIP. 196710271998022001	Pembimbing Pendamping	



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diteliti sebelumnya untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Tadulako maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan dan rumusan dari saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing dan masukan dari Tim Pengaji.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang telah dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palu, 20 juli 2025

Yang membuat pernyataan



Fitaqwa Prasni Ramadhan
B 101 21 097

ABSTRAK

Fitaqwa Prasni Ramadhan, Nomor Stambuk B10121097 Jurusan Administrasi Publik, Judul Skripsi: Collaborative Governance Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Pembimbing 1 Rahmawati Halim dan pembimbing II Nurhayati Hamid

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Collaborative Governance Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori. Ansell and Gash (2008) dengan 4 Indikator *starting condition* (kondisi awal), *institutional design* (desain kelembagaan), *facilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif), *collaborative process* (proses kolaborasi) Dasar penelitian ini adalah *field Research* (penelitian lapangan), jenis data yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Teknik purposive sampling, informan dalam penelitian berjumlah 5 orang. Pengumpulan data dan bahan dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore pada indikator *starting condition* (kondisi awal) latar belakang terbentunya kolaborasi berawal dari masalah yang kompleks terkait sampah . *Institutional design* (desain kelembagaan) dari hasil temuan peneliti dapat melihat lemahnya peraturan yang menjadi panduan kolaborasi. *Facilitative Leadership* (kepemimpinan fasilitatif) mediator terbukti menjadi kunci dalam keberhasilan kolaborasi meskipun masih menghadapai kendala berupa keterlambatan informasi. *Collaborative Proces* (proses kolaborasi) hasil kolaborasi telah membawa perubahan seperti berkurangnya sampah di daerah Kelurahan Tondo. Namun, pada proses kolaborasi ini masih kurang maksimal karena terdapat beberapa hambatan seperti evaluasi terkait hasil kolaborasi tidak di lakukan secara rutin dan rendahnya pemahaman warga mengenai pemilahan sampah membuat pengolahan sampah belum berjalan optimal.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, starting condition, institutional design, facilitative leadership, collaborative process*

ABSTRACT

Fitaqwa Prasni Ramadhan, Student ID Number B10121097, Department of Public Administration, Thesis Title: Collaborative Governance in Waste Management in Tondo Village, Mantikulore District, Palu City. First Advisor: Rahmawati Halim and Second Advisor: Nurhayati Hamid

This study aims to determine the effectiveness of collaborative governance in waste management in Tondo Village, Mantikulore District, Palu City. This study uses a qualitative descriptive method with a theoretical approach. Ansell and Gash (2008) used four indicators: starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative process. This study is based on field research, with primary and secondary data. Data collection used purposive sampling, with five informants. Data and materials were collected through observation, interviews, and documentation.

Based on the results of the study, it shows that Collaborative Governance waste management in Tondo Village, Mantikulore District, on the starting condition indicator, the background of the formation of collaboration begins with complex problems related to waste. Institutional design (institutional design) from the findings of researchers can see the weakness of regulations that guide collaboration. Facilitative Leadership (facilitative leadership) mediators proved to be the key to the success of collaboration even though they still face obstacles in the form of delays in information. Collaborative Process (collaborative process) the results of collaboration have brought changes such as reduced waste in the Tondo Village area. However, this collaborative process is still less than optimal because there are several important obstacles such as miscommunication between parties, lack of coordination and low understanding of residents regarding waste sorting making waste processing not run optimally.

Keyword: Collaborative Governance, starting condition, institutional design,

facilitative leadership, collaborative process

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Collaborative Governance Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu*” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Administrasi Publik, Program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, tetapi dengan segala doa dan usaha serta berbagai bantuan dari berbagai pihak yang tentunya selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Tercinta Prasmaji dan Ibu tercinta Rosmini atas segala pengorbanan yang tulus, ikhlas, serta doa yang diberikan kepada penulis yang tidak ada henti-hentinya.

Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Rahmawati Halim, M.Si., selaku Pembimbing I serta Ibu Dra. Nurhayati Hamid, M.Si selaku Pembimbing II yang sadar dan ikhlas membimbing serta mengarahkan penulis dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.

Untuk itu dengan segala hormat, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof Dr. Ir. Amar, ST., MT., IPU., Asean Eng. Rektor Universitas Tadulako.
2. Bapak Dr. Muh Nawawi, M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.
3. Bapak Dr. Mohammad Irfan, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. M. Nur Alamsyah, S.IP., M,SI selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum, dan ibu Dr. Rismawati,S.Sos, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.
4. Bapak Dr. Muhammad Arief, S.IP., M.Si, Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako
5. Ibu Dr. Intam Kurnia, M.Si ketua prodi Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

6. Kepada Tim Penguji Ujian, Bapak Prof. Dr. H. Slamet Riadi, M.Si selaku ketua penguji, Bapak Andi Maman Firmansyah. S.Sos., M.A.P selaku Sekretaris Penguji dan Ibu DR. Hj. Ani Susanti, S.Sos., M.Si selaku penguji utama yang telah memberi saran masukan kepada penulis dalam penyempurnaan skripsi.
7. Terima kasih kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi yang telah memberikan pengetahuan baik teori maupun praktek serta segenap staf yang telah membantu dalam perkuliahan.
8. Terima Kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dan seluruh staf, Kepala Kelurahan Tondo dan seluruh staf, TPS 3R Naroso dan seluruh staf. Bapak Ibnu Mundzir, SP., M.Eng, Bapak Moh. Vikri A. Erwin S. Lamporo, S.STP, Ibu Ahnizar, Bapak Baharuddin, Bapak Helmi. Yang sudah bersedia untuk menjadi informan dan memberikan data untuk penulisan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada bapak tercinta prasmaji dan Ibu tercinta Rosmini dan kakak Tersayang Resha Prasni Wahyuni, S.Pd dan Ellyza Prasni Wiguna, S.M atas dukungan, doa, dan bantuan yang diberikan selama proses perkuliahan.
10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Administrasi Publik khususnya kelas B yang telah memberikan banyak dukungan penuh sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	
SAMPUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN ALUR PIKIR	8
2.1 Kajian Pustaka	8

2.1.1 Penelitian Terdahulu	8
2.1.2 Landasan Teoritis dan Kepustakaan yang Relevan	16
2.1.2.1 Konsep Administrasi	16
2.1.2.2 Paradigma Administrasi Publik	18
2.1.2.3 <i>Collaborative</i>	21
2.1.2.4 <i>Governance</i>	23
2.1.2.5 <i>Collaborative Governance</i>	24
2.1.2.6 Pengelolaan	31
2.1.2.7 Sampah	
2.2 Alur Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Dasar dan Tipe Penelitian	31
3.1.1 Dasar Penelitian	36
3.1.2 Tipe Penelitian	36
3.2 Definisi Konsep	36
3.3 Jenis Data	37
3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	40
3.4.1 Sumber Data	40
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Instrumen Penelitian	41
3.6 Analisis Data	43
3.7 Penentuan Lokasi Penelitian	44
3.8 Waktu dan Jadwal Penelitian	47
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	47
4.1 Gambaran Umum Kelurahan Tondo	48
4.1.1 Sejarah Kelurahan Tondo	48
4.1.2 Kondisi Geografis	48

4.1.3 Kondisi penduduk	49
4.1.4 Struktur Organisasi Kelurahan Tondo	49
4.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	50
4.2.1 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	50
4.2.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	50
4.3 Gambaran Umum TPS 3R Naroso	51
4.3.1 Profil TPS 3R Naroso	52
4.3.2 Struktur Organisasi TPS 3R Naroso	52
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	52
5.1 Hasil	53
5.1.1 <i>Starting Condition</i> (kondisi awal)	53
5.1.2 <i>Institutional Design</i> (desain kelembagaan)	54
5.1.3 <i>Facilitative Leadership</i> (kepemimpinan fasilitatif)	59
5.1.4 <i>Collaborative Process</i> (proses kolaborasi)	64
5.1.4.1 Dialog Tatap Muka	69
5.1.4.2 Membangun Kepercayaan	69
5.1.4.3 Komitmen Dalam Proses	75
5.1.4.4 Pemahaman Bersama	79
5.1.4.5 Hasil Akhir	84
5.2 Pembahasan	89
5.2.1 <i>Starting Condition</i> (kondisi awal)	94
5.2.2 <i>Institutional Design</i> (desain kelembagaan)	94
5.2.3 <i>Facilitative Leadership</i> (kepemimpinan fasilitatif)	97
5.2.4 Dialog Tatap Muka	99
5.2.5 Membangun Kepercayaan	101
5.2.6 Komitmen Pada Proses	103
5.2.7 Pemahaman Bersama	105
5.2.8 Hasil Akhir	107

BAB VI PENUTUP	110
6.1 Kesimpulan	112
6.2 Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	114

DAFTAR TABEL

Tabel	Deskripsi	Halaman
2.1	Matrix penelitian terdahulu	12
4.1	Struktur Organisasi TPS 3R Naroso	52
5.1	Persepsi Informan Tentang <i>Starting Condition</i>	58
5.2	Persepsi Informan Tentang <i>Institutional Design</i>	63
5.3	Persepsi Informan Tentang <i>Facilitative Leadership</i>	68
5.4	Persepsi Informan Tentang Dialog Tatap Muka	74
5.5	Persepsi Informan Tentang Membangun Kepercayaan	78
5.6	Persepsi Informan Tentang Komitmen Pada Proses	83
5.7	Persepsi Informan Tentang Pemahaman Bersama	88
5.8	Persepsi Informan Tentang Hasil Akhir	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Deskrpsi	Halaman
2.1	Model <i>Collaborative Governance</i> Ansell and Gash	30
2.2	Alur Pikir	35
3.1	Model Interaktif Analisis Data	47
4.1	Struktur Organisasi Kelurahan Tondo	50
4.2	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	51
5.1	Pelaksanaan Dialog Tatap Muka	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara terpadat yang menduduki peringkat keempat di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 283.487.931 jiwa pada tahun 2024. Sebagai negara terpadat di dunia dengan populasi yang terus bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga mengakibatkan Indonesia menghadapi tantangan serius terkait sampah. World Health Organization (Chandra 2007) menyatakan sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sedangkan menurut Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat.

Sampah merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan, karena di dalam semua aspek kehidupan selalu menghasilkan sampah, sampah akan terus bertambah seiring dengan banyaknya aktifitas manusia yang disertai semakin besarnya jumlah penduduk di Indonesia. Menurut data Sistem Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2023 hingga 24 Juli 2024 timbunan sampah nasional dari 290 Kabupaten/Kota mencapai 31,9 juta ton. Dari jumlah tersebut, 64,3% atau 20,5 juta ton dapat terkelola, sementara 35,7% atau 11,4 juta ton tidak terkelola dengan baik.

Pengelolaan sampah berdasarkan Undang-undang No 18 Tahun 2008 dilakukan dengan dua fokus utama yakni pengurangan dan penanganan sampah yang menyatakan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan, pengelolaan sampah terbagi menjadi 3R yaitu *Reuse* menggunakan kembali sampah-sampah yang masih bisa digunakan atau bisa berfungsi lainnya, *Reduce* mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan atau memunculkan sampah, *Recycle* mengolah kembali sampah atau daur ulang menjadi suatu produk yang bermanfaat.

Untuk menciptakan kebersihan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat, tentunya suatu regulasi tidak akan cukup tanpa adanya suatu kolaborasi dari pemerintah. Kolaborasi dalam pemerintahan atau *Collaborative Governance* merupakan salah satu cara merespon keinginan para pemegang kepentingan dalam pelaksanaan dan merespon keterbatasan pemerintah yang tidak bisa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat. Adanya *Collaborative governance* dalam sistem pengelolaan sampah bertujuan untuk mencapai hasil yang maksimal seperti yang diharapkan.

Collaborative Governance adalah tata kelola pemerintahan yang melibatkan satu atau lebih lembaga pemerintah ataupun non pemerintah secara bersama dalam sebuah proses pembuatan kebijakan yang berlangsung secara formal, berorientasi konsensus, dan konsultatif yang bertujuan untuk membuat dan melaksanakan

kebijakan publik maupun mengelola program dan aset publik (Ansell dan Gash, 2008).

Sebelumnya ada beberapa penelitian yang dilakukan dengan topik pembahasan yang serupa salah satunya tentang *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah dan peneliti jadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sugiana Desi Safitri, Agus Zainal Abidin (2021). Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukan kondisi awal *collaborative governance* lokasi Bank Sampah Sejahtera hanyalah lahan kosong yang diatasnya terdapat tumbuhan pepohonan dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Desain kelembagaan aturan dasar yang mengatur setiap proses kolaborasi yang ada di Bank Sampah Sejahtera untuk saat ini hanya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah. Proses kepemimpinan fasilitator langsung dikoordinasikan oleh Ketua Bank Sampah Sejahtera. Komunikasi yang dijalankan antar aktor *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah pada bank sampah sejahtera saat ini sudah berlangsung dengan baik. permasalahan yang terjadi pada Bank Sampah Sejahtera yaitu minimnya dana operasional yang dibutuhkan untuk pengembangan rencana program baru pada Bank Sampah Sejahtera.

Pengelolaan sampah di Kota Palu tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah. Dalam Peraturan Daerah tersebut

bahwa pengelolaan sampah pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS (tempat pembuangan sampah) atau sarana pengumpulan sampah terpisah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan berskala kawasan. Salah satu aspek dari kompleksnya permasalahan sampah terletak pada tingkat pengawasan pemerintah dan partisipasi masyarakat yang diasumsikan masih tergolong rendah dalam kesadaran tentang sampah, dalam kaitan itulah keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan menjadi sangat penting sehingga proses dari implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Kelurahan Tondo berkolaborasi bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dan juga TPS 3R Naroso dalam bentuk pengelolaan sampah, untuk mewujudkan kolaborasi yang baik maka dari pihak yang terlibat dalam kolaborasi memiliki peran nya masing-masing. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dalam hal ini menyediakan pendanaan untuk keperluan sarana dan prasarana pendukung. Pihak Kelurahan Tondo memiliki peran sebagai pengawas dalam pengelolaan sampah. TPS 3R Naroso bertugas menjadi pihak yang mengelola sampah. RT yang berada di Kelurahan Tondo memiliki peran mengawasi masyarakat nya agar membuang sampah pada tempat yang telah di sediakan.

Kelurahan Tondo merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kota Palu. Luas wilayah 5,516 Ha jumlah penduduk 10,857 jiwa dengan luas wilayah, kepadatan

penduduk, dan banyak nya warung makan di Kelurahan Tondo secara tidak langsung berkontribusi banyak dalam menghasilkan sampah. Oleh karna itu, pihak Kelurahan Tondo berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dalam bentuk pengelolaan sampah.

Berdasarkan observasi awal yang di lakukan, peneliti menemukan beberapa masalah yang dihadapi dalam proses kolaborasi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dan Kelurahan Tondo. Masalah yang dihadapi berkaitan dengan teori Ansell and Gash, yaitu kondisi awal belum efektif nya TPS 3R Naroso dan kurang sarana dan prasarana pengangkutan sampah di Kelurahan Tondo, hal ini mengakibatkan pengelolaan sampah kurang efektif sehingga menghambat proses pengangkutan sampah hal itu dibuktikan dengan keluhan masyarakat sekitar Kelurahan Tondo terkait sampah yang tidak diangkut lebih dari 1-2 hari, mengingat luas Kelurahan Tondo 5,516 Ha dan kendaraan pengangkut sampah hanya berjumlah 2 truk 2 mobil pick up dan 4 motor tiga roda dan tim pengangkut sampah yang kurang yaitu hanya berjumlah 10 orang , jumlah tersebut jelas tidak memadai untuk menangani volume sampah yang ada setiap harinya. Kedua desain kelembagaan peneliti menemukan masalah dimana desain kelembagaan yang belum jelas mengakibatkan aturan-aturan dasar dalam kolaborasi tidak berjalan seperti yang di harapkan sedangkan jika dikaitkan dengan teori Ansell and Gash menekankan pentingnya desain kelembagaan yang jelas dan terorganisir agar setiap pihak tahu peran dan tanggung jawabnya. Masalah selanjutnya yang hadapi berkaitan dengan dialog tatap muka dimana kurangnya kesadaran masyarakat sekitar dalam membuang sampah pada tempatnya,

Meskipun Kelurahan Tondo sudah mempunyai TPS (tempat pembuangan sementara) masyarakat kerap membuang sampah sembarangan. Dalam hal ini, pentingnya melakukan sosialisasi terkait membuang sampah pada tempatnya, dan tentunya membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan pihak Kelurahan Tondo untuk meningkatkan kesadaran agar tujuan kolaborasi tercapai.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan hasil penelitian menunjukan bahwa *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, pada indikator *starting condition* (kondisi awal) latar belakang terbentunya kolaborasi berawal dari masalah yang kompleks terkait sampah . *Institutional design* (desain kelembagaan) dari hasil temuan peneliti dapat melihat lemahnya peraturan yang menjadi panduan kolaborasi. *Facilitative Leadership* (kepemimpinan fasilitatif) mediator terbukti menjadi kunci dalam keberhasilan kolaborasi meskipun masih menghadapai kendala berupa keterlambatan informasi. *Collaborative Proces* (proses kolaborasi) hasil kolaborasi telah membawa perubahan seperti berkurangnya sampah di daerah Kelurahan Tondo. Namun, pada proses kolaborasi ini masih kurang maksimal karena terdapat beberapa hambatan seperti evaluasi terkait hasil kolaborasi tidak di lakukan secara rutin dan rendahnya pemahaman warga mengenai pemilahan sampah membuat pengolahan sampah belum berjalan optimal.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis dengan menggunakan teori Ansell and Gash (2008) yang

mengemukaan 4 proses *Collaborative Governance* yaitu *starting condition* (kondisi awal), *institutional design* (desain kelembagaan), *facilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif), *collaborative process* (proses kolaborasi) tentang bagaimana *collaborative governance* di Kelurahan Tondo.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah *collaborative governance* pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo

Kecamatan Mantikulore Kota Palu di laksanakan dengan baik.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui *collaborative governance* pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan memberikan orientasi dan sebagai bahan referensi dalam dunia akademik, dan rujukan baik instansi atau lembaga dalam melakukan pekerjaan administrasi. Sekaligus rujukan baik instansi atau lembaga dalam *collaborative governance*.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi baik output dan input kepada pihak-pihak yang membutuhkan serta memberikan gambaran sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kelurahan Tondo.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN ALUR PIKIR

2.1 Kajian pustaka

2.1.1 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Niluh Eka Puri Setiawandari, Arimurti Krisbowo (2023), dengan judul “*collaborative governance* dalam pengelolaan sampah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta yang terjadi di TPST. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung. Berdasarkan temuan penelitian, proses kerjasama di TPST Sampah Tanggung Jawabku di Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik meskipun masih terdapat hambatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tata kelola kolaboratif telah berjalan secara optimal.

Sugiana Desi Safitri, Afifuddin, Agus Zainal Abidin (2021), melakukan penelitian dalam jurnal nya dengan judul “*collaborative governance* dalam pengelolaan sampah (studi pada bank sampah sejahtera desa kalimo’ok kecamatan kalianget kabupaten sumenep)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sampah yang ada di Desa Kalimo’ok, dan juga untuk mengetahui pengelolaan sampah pada Bank Sampah Sejahtera dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Sejahtera. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu sampah yang dihasilkan di Desa Kalimo’ok bersumber dari pemukiman masyarakat dan sarana pelayanan masyarakat di Desa Kalimo’ok, sedangkan untuk jenis sampah yang dihasilkan di Desa Kalimo’ok yaitu jenis sampah kering dan sampah basah. Proses dianalisis menggunakan teori Ansel dan Gash dalam Islamy (2018:18) pada kondisi awal lokasi Bank Sampah Sejahtera hanyalah lahan kosong yang diatasnya terdapat tumbuhan pepohonan dan tidak dimanfaatkan.

Tri Oktavia Ulya, Augustin Rina Herawati, Ari Subowo melakukan penelitian dengan judul “*collaborative governance* pengelolaan sampah di pantai teluk penyu kabupaten cilacap”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu, serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tata

kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu telah menerapkan kelima dimensi proses kolaborasi dengan cukup baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu antara lain kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif, namun dimensi desain kelembagaan tersebut masih belum optimal karena belum adanya landasan hukum yang secara khusus mengatur proses kolaborasi pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap.

Idris, Dian Herdiana, Iqbal Miftakhul Mujtahid (2022), melakukan penelitian ini dengan judul “*collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di wilayah kecamatan pulau tiga barat kabupaten natuna”. tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis collaborative governance dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat sudah berjalan cukup baik yang ditilik dari *Starting Condition, Collaborative Process, Facilitative Leadership dan Institutional design*. Selain itu, faktor-faktor yang menghambat proses kolaboratif masih terjadi pada

indikator *financial* yaitu masih terbatasnya pengalokasian anggaran untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Lisdanur Ulfaida, Lukman Munawar Fauzi, Toto Kushartono (2024) judul penelitian “*collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di pasar antri kota cimahi. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Pasar Antri Kota Cimahi. Metode yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik Analisis data melalui analisis selama di lapangan, dan analisis setelah di lapangan dengan tahapan pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan ketiganya. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Pasar Antri Kota Cimahi menunjukan bahwa berdasarkan adanya saling percaya antara partisipan yaitu kepercayaan kepada pemerintah masih kurang karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Kemudian pada pembagian pembagian akuntabilitas yaitu berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, namun belum cukup untuk membuat kolaborasi lebih efektif, karena hanya sebagian dari *stakeholder* yang mengubah pola pikirnya. Dan berbagi informasi yaitu komunikasi yang terjalin masih kurang dan adanya keterlambatan informasi yang di dapatkan oleh masyarakat.

Tabel 2.1
Matrix Penelitian Terdahulu

No	Judul penelitian	Teori penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1	Niluh Eka Puri Setiawandari, Arimurti Krisbowo (2023), dengan judul “ <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan sampah”.	Ansel dan Gash (2008) memiliki 4 indikator yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, proses kolaborasi.	Penelitian kualitatif deskriptif Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung.	Hasil dari penelitian ini proses kerjasama di TPST Sampah Tanggung Jawabku di Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik meskipun masih terdapat hambatan.
2	Sugiana Desi Safitri, Afifuddin, Agus Zainal Abidin (2022), “ <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan sampah (studi pada bank sampah sejahtera desa kalimo’ok kecamatan kalianget kabupaten sumenep)”	Ansel dan Gash (2008) memiliki 4 indikator yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, proses kolaborasi.	Penelitian kualitatif deskriptif Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung.	Hambatan yang terjadi pada proses <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Sejahtera di Desa Kalimo’ok yaitu permasalahan tentang pengelompokan jenis sampah yang disetorkan kepada rongsokan sampah.

3	Tri Oktavia Ulya, Augustin Rina Herawati, Ari Subowo melakukan penelitian dengan judul “ <i>collaborative governance</i> pengelolaan sampah di pantai teluk penyu kabupaten cilacap”	Ansel dan Gash (2008) memiliki 4 indikator yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, proses kolaborasi.	Penelitian kualitatif deskriptif Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu telah mengimplementasikan kelima dimensi proses kolaborasi dengan cukup baik. namun dimensi desain kelembagaan masih belum optimal karena belum adanya landasan hukum yang secara khusus
4	Idris, Dian Herdiana, Iqbal Miftakhul Mujtahid (2022), melakukan penelitian ini dengan judul “ <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan sampah di wilayah kecamatan pulau tiga barat kabupaten natuna	Ansel dan Gash (2008) memiliki 4 indikator yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, proses kolaborasi.	Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang langsung dari sumbernya, yaitu melalui wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan informan. Sedangkan data sekunder, diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu seperti dokumen-dokumen, arsip-arsip.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat sudah berjalan cukup baik yang ditilik dari <i>Starting Condition, Collaborative Process, Facilitative Leadership dan Institutional design</i> . Selain itu, faktor-faktor yang menghambat proses kolaboratif masih terjadi pada indikator <i>financial</i> yaitu masih terbatasnya pengalokasian anggaran untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat.

5	Lisdanur Ulfaida, Lukman Munawar Fauzi, Toto Kushartono (2024) “ <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan sampah di pasar antri kota cimahi	Ansel dan Gash (2008) memiliki 4 indikator yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, proses kolaborasi.	Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang langsung dari sumbernya, yaitu melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan.	Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa <i>Collaborative Governance</i> dalam pengelolaan sampah di Pasar Antri Kota Cimahi menunjukkan bahwa berdasarkan adanya saling percaya antara partisipan yaitu kepercayaan kepada pemerintah masih kurang karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik
6	Fitaqwa Prasni Ramadhan (2025) <i>Collaborative Governance</i> dalam pengelolaan sampah di kelurahan tondo kecamatan mantikulore kota palu	Ansel dan Gash (2008) memiliki 4 indikator yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, proses kolaborasi,	Dasar penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan realitas peristiwa diteliti yang dilakukan terhadap variabel tunggal.	Penerapan <i>Collaborative Governance</i> dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo menunjukkan hasil positif, namun belum optimal. Kolaborasi terbentuk akibat masalah sampah yang kompleks, dengan kelembagaan yang lemah, kepemimpinan yang cukup efektif meski terkendala komunikasi, serta proses yang

				menurunkan volume sampah tetapi terkendala kurangnya evaluasi dan pemahaman warga.
--	--	--	--	--

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berjudul *Collaborative Governance pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu*. Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu yang menjadi landasan serta arahan dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan karena beberapa penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dalam hal metodologi dan pendekatan yang digunakan, meskipun terdapat pula perbedaan dalam aspek tertentu. Salah satu persamaan yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis fenomena secara mendalam berdasarkan data yang dikumpulkan. Namun, terdapat pula beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Salah satu perbedaan utama terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian ini dilakukan dalam konteks yang berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini juga menunjukkan variasi tertentu yang membedakannya dengan temuan penelitian terdahulu. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik subjek penelitian, kondisi sosial dan budaya, serta variabel lain yang turut berperan dalam proses penelitian.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru serta kontribusi ilmiah yang lebih kaya dalam bidang yang dikaji.

2.1.2 Landasan Teoritis Dan Kepustakaan Yang Relevan

2.1.2.1 Konsep Administrasi

Di lihat dari asal kata, administrasi berasal dari kata Yunani kuno, yaitu “ad dan ministere” dari bahasa latin. Kemudian dengan mengkombinasikan dua kata tersebut ke dalam bahasa inggris, lahirlah kata administer dan kata bendanya administration. Kata “ad” pada awal kata minister berarti membantu atau menambah, dan melayani (Dimock & Demock, 1998:21).

Administrasi berasal dari bahasa Yunani dan memiliki banyak definisi. Administrasi dibagi menjadi administrasi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Kata administrasi banyak dikemukakan oleh para ahli yang memiliki pendapat yang berbeda-beda, namun tidak lepas dari arti administrasi. Kata administrasi yang sangat berkembang saat ini sangat membantu dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai hal yang diinginkan.

Di Indonesia, administrasi adalah suatu proses kegiatan dengan bantuan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang sering kali didefinisikan dalam arti "sempit". Berikut ini adalah penjelasan mengenai administrasi dalam arti sempit dan luas:

1. Administrasi dalam arti sempit, seperti yang telah disebutkan di atas, pengertian administrasi yang berkembang khususnya di Indonesia selama ini sering diartikan sebagai tulis-menulis, catat-mencatat, mengetik, surat-menjurat, yaitu suatu proses kegiatan yang berhubungan dengan pengiriman informasi secara tertulis mulai dari menyusun, menulis sampai dengan mengirim informasi dan sampai kepada pihak yang dituju.
2. Administrasi dalam arti luas adalah suatu proses kerja sama penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efisien dan efektif.

Sondang P. Siagian (2004:2) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. The Liang Gie (1993:9) mendefinisikan administrasi sebagai rangkaian kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Nigro & Nigro dalam Rahman (2017:19) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencangkup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif, mempunyai peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik sehingga menjadi bagian dari proses politik. Definisi ini lebih menekankan proses kelembagaan yang melibatkan usaha kerjasama kelompok sebagai kegiatan publik.

2.1.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Dalam perkembangan bidang administrasi publik, terdapat sejumlah "paradigma" yang menggambarkan perubahan dan perbedaan dalam tujuan, teori dan metodologi atau dalam bangunan epistemologi dan nilai-nilai yang mendasarinya. Paradigma-paradigma administrasi.

Nicholas Henry menjelaskan dengan mengacu pada pandangan Robert T. Golembiewski, bahwa setiap fase dapat dicirikan atas dasar kepemilikan lokus atau fokus. Lokus adalah tempat dimana bidang itu berada, yang mencakup "*where of the field*" atau bidang/tempat dimana metode itu digunakan atau diterapkan. Lokus administrasi publik biasanya adalah birokrasi pemerintah, meskipun tidak selalu demikian dan sering kali lokusnya adalah birokrasi pemerintah. Meskipun tidak terlalu demikian dan sering kali lokus tradisional/klasik menjadi kabur. Sedangkan fokus adalah kekhususan dari bidang ini. Fokus mempertanyakan "*what of the field*" atau metode dasar yang digunakan atau metode ilmiah apa yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Salah satu fokus administrasi selama ini adalah studi tentang prinsip-prinsip administrasi tertentu, namun sekali lagi fokus disiplin ilmu ini mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan paradigma administrasi negara. Oleh karena itu, Golembiewski menyatakan bahwa paradigma administrasi negara dapat dipahami melalui lokus dan fokusnya.

Administrasi Publik Klasik (*Old Public Administration*). Perkembangan paradigma administrasi publik klasik dimulai sejak awal lahirnya administrasi publik itu sendiri. Menurut Khun dalam Miftah Thoba (2014:170-171) bawha suatu perkembangan paradigma sebenarnya merupakan tanda kematangan ilmu pengetahuan.

Aministrasi Publik Baru (*New Public Administration*) muncul pada akhir tahun 1960-an dan berkembang pada awal tahun 1970-an yang muncul sebagai akibat dari perdebatan sengit mengenai status administrasi publik sebagai disiplin ilmu dan profesi, paradigma ini pada dasarnya mengkritik paradigma administrasi lama atau klasik yang terlalu menekankan pada parameter-parameter ekonomi. Menurut pandangannya bahwa kinerja administrasi publik tidak hanya dinilai dari pencapaian nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas saja, tetapi juga pada nilai keadilan sosial.

Dengan demikian, administrasi publik baru ini menitikberatkan pada upaya-upaya yang mencakup usaha agar organisasi publik mampu mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal yang dilakukan dengan pengembangan sistem desentralisasi dan organisasi yang demokratis, responsif dan partisipatif, serta dapat memberikan pelayanan publik secara merata.

Manajemen Publik Baru (*New Public Management*). Sebuah konsep manajemen publik/pemerintah baru, yang menerapkan praktik kerja pemerintah daerah sehingga akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Ide yang dikemukakan dalam pemikiran tersebut menyatakan bahwa dalam sektor publik harus berpusat

pada sehingga terhadap efisien biaya yang besar bagi pemerintah. Paradigma ini terfokus untuk kesejahteraan masyarakat yang bagaimana seharusnya sektor publik bekerja dengan mencapai efisisensi dan efektivitas dengan menyesuaikan terhadap keadaan yang terjadi di masyarakat.

Kebijakan untuk memodernisasi sektor publik dan menjadikannya lebih efektif. Ide dasar dari NPM adalah bahwa manajemen sektor publik yang berorientasi pasar akan menghasilkan efisiensi biaya yang lebih besar bagi pemerintah, tanpa mengurangi tujuan dan sasarannya.

Pelayanan Publik Baru Paradigma (*New Public Service*). Konsep yang diambil dari tulisan Robert B. Denhardt dan Janet V. Denhardt The New Public Service: Melayani, Bukan Mengarahkan. karena pemilik kepentingan pemilik publik yang sesungguhnya adalah masyarakat, maka administrator publik harus fokus pada tanggung jawab melayani dan memberdayakan warga negara melalui manajemen organisasi dan implementasi kebijakan publik. Perubahan orientasi tentang posisi warga negara, nilai-nilai yang dikedepankan dan peran pemerintah ini menimbulkan perspektif baru dalam administrasi public.

Perspektif *New Public Service* telah memberikan ruang perubahan untuk memandang apa yang dimaksud dengan kepentingan publik, perubahan cara pengorganisasian kepentingan tersebut, dan perubahan cara administrator publik menjalankan tugas pemenuhan kepentingan publik. Perspektif ini mengedepankan posisi masyarakat sebagai warga negara dalam kaitannya dengan penyelenggaraan

pemerintahan. Perspektif ini membawa upaya demokratisasi administrasi publik. Paradigma NPS berpandangan bahwa tanggung jawab birokrasi lebih diarahkan kepada warga negara daripada hubungan pengguna, konstituen atau pemilih dan bukan pelanggan.

Tata Kelola publik baru (*New Public Governance*) merupakan konsep kontemporer dalam pemerintahan yang menekankan pentingnya kolaborasi, transparansi, dan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Ini adalah pendekatan pluralistik yang melibatkan banyak aktor, termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Konsep NPG berakar pada gagasan bahwa bentuk pemerintahan tradisional, seperti sistem hierarki dan terpusat, tidak lagi efektif dalam mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi masyarakat modern. Sebaliknya, NPG mendukung pendekatan yang lebih terdesentralisasi dan partisipatif, yang mana masyarakat secara aktif terlibat dalam proses tata kelola dan memiliki hak suara yang lebih besar dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

2.1.2.3 *Collaborative*

Collaborative Dalam praktik administrasi publik, kolaborasi merupakan salah satu konsep dalam menjalankan pemerintahan, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan kebijakan yang selalu mengikutsertakan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat untuk memecahkan berbagai masalah publik. Kata “Kolaborasi” pada awalnya digunakan pada abad ke-19 seiring dengan

perkembangan industrialisasi. dengan perkembangan industrialisasi. Organisasi-organisasi yang kompleks organisasi yang kompleks mulai bermunculan yang mengakibatkan pembagian kerja dan tanggung jawab yang lebih besar (O'Flynn dan Wanna, 2008).

Mendefinisikan kolaborasi sebagai kerja sama yang melibatkan organisasi publik dan non-publik yang melibatkan organisasi publik dan non-publik yang masing-masing pihak saling bergantung karena keterbatasan sumber daya. pihak yang saling ketergantungan karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Kerjasama atau kolaborasi dilakukan antar aktor, antar organisasi atau antar lembaga untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri. dicapai jika dilakukan secara sendiri-sendiri. Adapun istilah kerjasama dan kolaborasi, dalam bahasa Indonesia istilah kerjasama dan kolaborasi masih digunakan secara bergantian. kolaborasi masih digunakan secara bergantian dan tidak ada perbedaan makna yang mendalam dari istilah tersebut. makna yang mendalam dari istilah tersebut (Abdul Sabaruddin, 2015).

Mendefinisikan kolaborasi sebagai bentuk bekerja bersama atau bekerja sama dengan orang lain. Hal ini mengimplikasikan bahwa para aktor, baik individu, kelompok atau organisasi bekerja sama dalam suatu usaha. bersama-sama dalam suatu usaha (O'Flynn dan Wanna, 2008)

2.1.2.4 *Governance*

Governance secara umum dapat dipahami sebagai bentuk yang tidak hanya berpusat pada pemerintah, tetapi juga melibatkan aktor-aktor lain untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan publik. yang tidak hanya berpusat pada pemerintah, tetapi juga melibatkan aktor-aktor lain untuk berpartisipasi, baik dari masyarakat, swasta, dan lainnya (Astuti et al., 2020).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Maksudi Beddy Irawan (2017), yang mendefinisikan tata kelola tata kelola sebagai suatu proses pembuatan kebijakan, di mana kebijakan dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur unsur pemerintahan seperti negara (governance), sektor swasta (private), dan masyarakat (society). Secara lebih rinci, Arifin Tahir (2020) berpendapat bahwa istilah governance lebih kompleks karena melibatkan tiga pilar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam posisi yang sejajar dan saling mengontrol. Hubungan ketiganya harus dalam posisi seimbang dan saling kontrol (checks and balances), untuk menghindari terjadinya penguasaan oleh pemerintah. kontrol (checks and balances), untuk menghindari penguasaan atau eksplorasi oleh salah satu komponen terhadap komponen lainnya. Jika satu komponen lebih tinggi dari komponen lainnya, maka yang terjadi adalah dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya. Yang terjadi adalah dominasi kekuasaan antara dua komponen.

2.1.2.5 *Collaborative Governance*

Dalam *Collaborative Governance*, dibutuhkan beberapa pihak dalam mewujudkan tujuan dari sebuah kebijakan atau program. Seperti yang dikemukakan oleh Emerson dan Nabatchi dan Balogh (2012) bahwa Tata kelola kolaboratif (*Collaborative Governance*) secara luas sebagai proses dan struktur dalam pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai level, baik tataran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mencapai tujuan publik dan menyelesaikan masalah yang tidak dapat dicapai dengan cara lain.

Berikut ini penjelasan terkait indikator teori Emerson, Nabatchi, dan Balogh :

1. Dinamika Kolaborasi

Menggambarkan proses kolaborasi sebagai sebuah tahapan linier yang terjadi dari waktu ke waktu dimulai dari pendefinisian masalah menuju setting agenda hingga implementasi. Teori ini fokus pada tiga komponen interaksi dari dinamika kolaborasi. Penggerakan prinsip bersama (*Principled engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*) dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*).

2. Tindakan-tindakan dalam kolaborasi

Tindakan kolaborasi dilatarbelakangi oleh pemikiran mengenai sulit tercapainya tujuan jika hanya satu kelompok atau organisasi yang bertindak sendiri. Tindakan-tindakan dalam kolaborasi merupakan inti dari kerangka *Collaborative Governance*. Tindakan-tindakan kolaborasi merupakan hasil utama dari proses kolaborasi linier yang terkadang dikaitkan dengan dampak. Hal ini dikarenakan pada dasarnya proses dan hasil tidak dapat dipisahkan dari dampak itu sendiri.

3. Dampak dan adaptasi hasil Tindakan pada dinamika kolaborasi

Dampak yang dimaksud adalah dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi. Karakteristik dampak ada yang diharapkan, yang tidak diharapkan, serta tidak terduga. Dampak yang diharapkan adalah yaitu hasil-hasil positif yang terus memberlangsungkan semangat para aktor. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan seperti kendala kendala dalam pelaksanaan kolaborasi. Dampak tidak terduga juga dapat muncul secara langsung maupun tidak pada proses kolaborasi.

Menurut pendapat Sudarmo (2015) *collaborative governance* merupakan kombinasi dua konsep yakni *collaborative* dan *governance*. Berarti bersama-sama bekerja, menjalankan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang melampaui batas-batas hubungan multi sektor, dan dalam menjalankan kerja sama tersebut didasarkan pada nilai timbal balik.

Berikut ini penjelasan terkait indikator teori Sudarmo :

1. *Networked Structure Networked Structure*

Mengacu pada hubungan antara elemen-elemen dalam suatu sistem yang bersama-sama mencerminkan aspek fisik dari jaringan yang diatur. Dalam pemerintahan kolaboratif, struktur jaringan ini menghindari pembentukan hierarki, sehingga tidak ada individu yang memiliki jabatan tertinggi. Semua pihak yang terlibat memiliki otoritas, tanggung jawab, hak, dan peluang yang sama dalam mengakses sumber daya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Commitment to a Common Purpose

Menjelaskan alasan mengapa suatu jaringan harus ada, yaitu karena adanya perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan positif yang terartikulasi dari misi umum suatu organisasi atau lembaga.

3. Trust Among the Participants

Mengacu pada hubungan profesional dan sosial di mana para pihak mempercayai informasi atau usaha-usaha dari stakeholders lain untuk mencapai tujuan bersama. Rasa saling percaya antar pihak (masyarakat, pemerintah, dan swasta) sangat penting dalam kolaborasi.

4. Governance

Merujuk pada bagaimana aturan kerjasama dilaksanakan, termasuk peraturan terkait pelaksanaan program dan kebebasan memutuskan bagaimana kerjasama dilaksanakan.

5. Access to Authority

Menjelaskan tentang tersedianya standar-standar prosedur yang jelas dan diterima secara luas oleh para stakeholders. Dalam kolaborasi setiap stakeholders memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang telah dibuat.

6. Distributive Accountability

Mengacu pada pembagian tanggung jawab dan pengambilan keputusan di antara seluruh anggota jaringan.

7. Information Sharing

Menekankan pada kemudahan akses informasi bagi para anggota, serta perlindungan privasi dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota.

8. Access to Resources

Mencakup ketersediaan sumber daya keuangan, teknis, manusia, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan kolaborasi.

Ansell and Gash (2008) mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai tata kelola pemerintahan yang melibatkan satu atau lebih lembaga pemerintah

ataupun non pemerintah secara bersama dalam sebuah proses pembuatan kebijakan yang berlangsung secara formal, berorientasi konsensus, dan konsultatif yang bertujuan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan publik maupun mengelola program dan aset publik.

Berikut ini penjelasan terkait indikator teori Ansell and Gash :

1. *starting condition* (kondisi awal)

kondisi awal adalah kondisi awal sebelum memasuki tahapan kolaborasi. Kondisi awal ini sangat berpengaruh dimana dapat menjadi pendukung atau penghambat kerjasama. Ada tiga variabel besar yang ingin dicapai dari tahap kondisi awal yaitu, ketidakseimbangan antara pengaruh/kekuatan, sejarah masa lalu, serta bentuk dorongan dan hambatan dalam mengikuti kolaborasi.

2. *institutional design* (desain kelembagaan)

Desain kelembagaan mengacu pada aturan-aturan dasar dalam kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, bagaimana forum dibentuk dan transparansi pelaksanaan program.

3. *facilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif)

Kepemimpinan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam sebuah forum yang dibentuk, pemimpin sebagai mediator atau individu yang bertugas untuk memimpin sebuah forum, dibutuhkan kepemimpinan yang dapat

dihormati dan dipercaya oleh semua stakeholder. Dalam hal ini membahas tentang bagaimana cara meyakinkan para stackholder tentang kolaborasi dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah dan dapat menjadi mediator dalam kolaborasi yang dibangun.

4. *collaborative process* (proses kolaboratif)

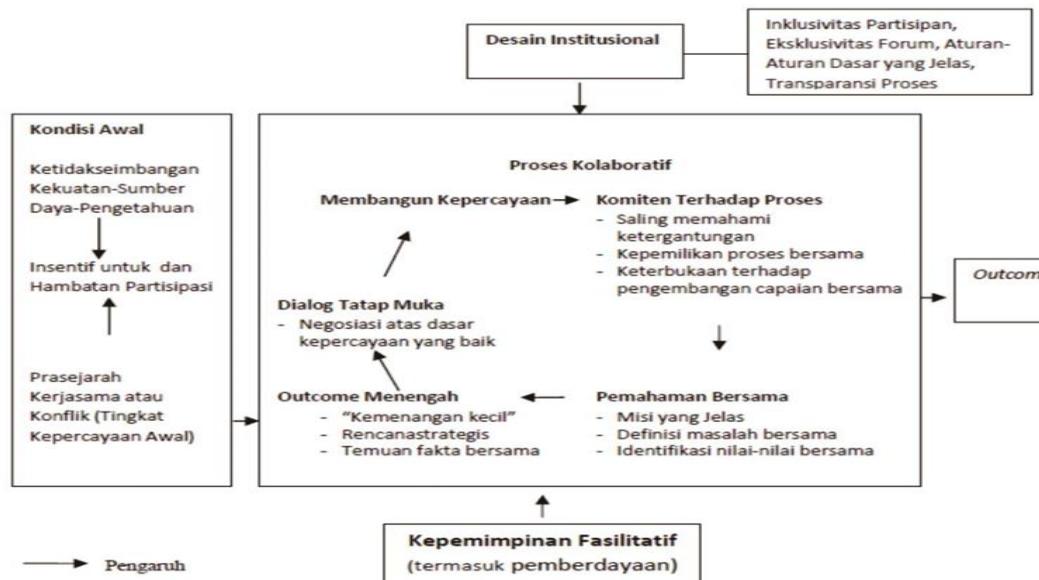
Setelah melewati tiga tahapan di atas, selanjutnya masuk ke proses kolaborasi yang akan menentukan bagaimana mekanisme dalam berkolaborasi. Ada lima proses yang harus dilakukan, antara lain;

- a. Dialog Tatap Muka. Yang dimaksud adalah pertemuan langsung antara organisasi/lembaga yang akan terlibat dalam kolaborasi, yang dilakukan secara formal maupun non formal untuk membahas proses-proses dalam kolaborasi yang dibangun, serta bagaimana membangun relasi dengan pemerintah dan masyarakat yang ada.
- b. Membangun Kepercayaan. Hal ini sangat penting dalam sebuah kolaborasi, membangun kepercayaan ini dimulai dari bagaimana organisasi/lembaga terkait saling mempercayai satu sama lain, begitu juga dengan pemerintah dan masyarakat.
- c. Komitmen dalam Proses Kolaborasi. Komitmen yang dimaksud adalah tanggung jawab yang harus dipegang oleh masing-masing pihak yang berkolaborasi, komitmen dan kerja sama dalam mencapai apa yang ingin dicapai.

- d. Pemahaman Bersama. Yang dimaksud dengan pemahaman bersama adalah memiliki tujuan bersama yang jelas antar pemerintah yang berkolaborasi dan mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang ingin dicapai.
- e. Hasil akhir. Hasil antara merupakan hasil sementara yang diperoleh atau dicapai dari proses kolaborasi, hasil sementara yang diperoleh dapat menjadi pendorong dalam membangun kepercayaan untuk terus berkolaborasi. Hasil antara ini tidak terlepas dari manfaat apa yang didapatkan oleh komunitas dan organisasi.

Gambar 2.1

Model *Collaborative Governance* Ansell and Gash



Sumber : Ansell and Gash (2008)

2.1.2.6 Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Pemimpin yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol.

2.1.2.7 Sampah

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang patut untuk diperhatikan. Sampah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah merupakan suatu buangan yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia. Volume peningkatan sampah sebanding dengan meningkatnya tingkat konsumsi manusia.

Manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kebutuhan yang bersifat individual maupun kolektif, sehingga selalu ada upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Aktifitas manusia dalam upaya mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin beragam seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Sebagian besar orang menganggap sampah merupakan masalah, padahal setiap saat sampah terus bertambah dan tanpa mengenal hari libur karena setiap makhluk terus menerus memproduksi sampah. Bambang Suwerda (2012) mengatakan bahwa Setiap hari sampah dihasilkan dari keluarga/rumah tangga, yang dari sisi kuantitas/jumlah biasanya menempati posisi tertinggi, sampah rumah sakit dan industri yang sangat berbahaya, juga sampah dari tempat tempat umum misalnya terminal, pasar, tempat hiburan, sekolah, kantor, dan lain lain.

2.2 Alur Pikir

Penelitian ini akan membahas tentang *Collaborative Governance* pengelolaan sampah di kelurahan tondo kecamatan mantikulore kota palu. untuk memudahkan penelitian ini, penulis mengacu pada teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansel dan Gash (2008). Model *collaborative governance* yang dikemukakan di bagi menjadi 4 yaitu *starting condition* (kondisi awal), *institutional design* (desain kelembagaan), *facilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif), *collaborative proces* (proses kolaboratif).

Starting condition (kondisi awal) Kondisi awal sebelum memasuki tahap kolaborasi memiliki peran yang sangat penting, karena dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat dalam menjalin kerja sama. Pada tahap ini terdapat tiga variabel utama yang perlu diperhatikan, yaitu ketidakseimbangan kekuasaan atau pengaruh, latar belakang hubungan di masa lalu, serta berbagai bentuk dorongan dan hambatan dalam berpartisipasi dalam kolaborasi.

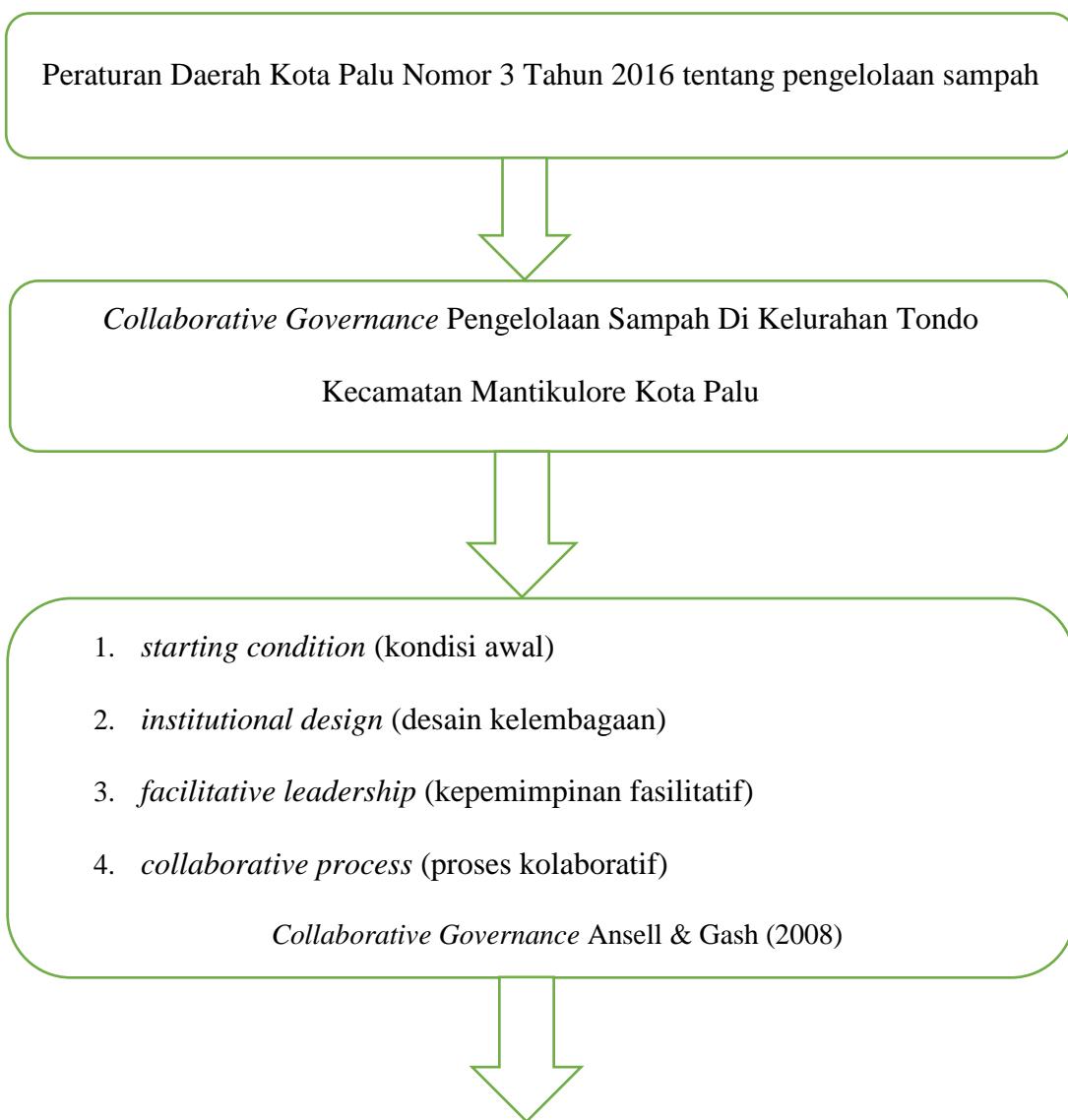
Institutional design (desain kelembagaan) Mengacu pada bagaimana aturan-aturan dasar untuk legitimasi prosedural dan proses kolaborasi. Penyelenggaranya harus bersifat terbuka dan inklusif agar setiap kelompok merasa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Desain institusional yang ada berupa partisipasi forum, aturan, transparansi, dan forum terbatas.

Facilitative leadership (kepemimpinan fasilitatif) sangat mungkin terjadi konflik dan ketidakpercayaan yang tinggi antar stakeholder, namun biasanya ada

keinginan yang besar dari para stakeholder untuk berpartisipasi, sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya oleh para stakeholder.

collaborative process (proses kolaboratif) Awal dari proses kolaboratif sangat sulit untuk menentukan dari mana harus memulai. Lima proses kolaboratif yaitu:

- a. Dialog tatap muka Semua tata kelola kolaboratif dibangun berdasarkan dialog antar pemangku kepentingan, dialog ini merupakan proses yang berorientasi pada lahirnya kesepakatan.
- b. Membangun kepercayaan. Tidak terlepas dari proses dialog, pemimpin kolaboratif harus mampu membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan.
- c. Komitmen dalam proses kolaborasi. Saling ketergantungan dan tanggung jawab yang tinggi di antara para pemangku kepentingan akan meningkatkan komitmen dalam berkolaborasi.
- d. Pemahaman bersama. Pemahaman bersama ini dapat berupa tujuan bersama yang jelas, definisi yang jelas tentang masalah yang dihadapi dan pemahaman bersama tentang nilai yang ingin dicapai dalam kolaborasi.
- e. Hasil akhir. Kolaborasi akan lebih mungkin berlanjut ketika hasil dari tujuan dan manfaat kolaborasi terlihat nyata, meskipun kecil, sebagai hasil antara dari proses kolaborasi.

Gambar 2.2**Alur Pikir**

Collaborative Governance Pengelolaan Sampah dilaksanakan dengan baik

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Dasar dan Tipe Penelitian

3.1.1 Dasar Penelitian

Dasar penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan realitas peristiwa diteliti yang dilakukan terhadap variabel tunggal. Dalam hal ini masalah yang diteliti berkaitan dengan *collaborative governance* pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu.

3.1.2 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2020) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2020:7) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk katakata atau gambar-gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimana *Collaborative governance* pengelolaan sampah di kelurahan tondo kecamatan mantikulore kota palu.

3.2 Defenisi Konsep

Adapun untuk memperjelas dan mempermudah analisis dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menguraikan definisi konsep yang bertujuan untuk mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Fokus penelitian ini adalah bagaimana *collaborative governance* dalam upaya pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Dasar dalam penelitian ini adalah mengacu pada model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008) yang terdiri dari 4 variabel, keempat variabel tersebut dijadikan konsep untuk penelitian ini.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai definisi konsep penelitian:

1.starting condition (kondisi awal)

Yang dimaksud dengan kondisi awal adalah kondisi awal sebelum memasuki tahapan kolaborasi. Kondisi awal ini sangat berpengaruh dimana dapat menjadi pendukung atau penghambat kerjasama. Ada tiga variabel besar yang ingin dicapai dari tahap kondisi awal yaitu, ketidakseimbangan antara pengaruh/kekuatan, sejarah masa lalu, serta bentuk dorongan dan hambatan dalam mengikuti kolaborasi.

2.institutional design (desain kelembagaan)

Desain kelembagaan mengacu pada aturan-aturan dasar dalam kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, bagaimana forum dibentuk dan transparansi pelaksanaan program.

3.facilitative leadership (kepemimpinan fasilitatif)

Kepemimpinan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam sebuah forum yang dibentuk, pemimpin sebagai mediator atau individu yang bertugas untuk memimpin sebuah forum, dibutuhkan kepemimpinan yang dapat dihormati dan dipercaya oleh semua stakeholder. Dalam hal ini membahas tentang bagaimana cara meyakinkan para stackholder tentang kolaborasi dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah dan dapat menjadi mediator dalam kolaborasi yang dibangun.

4.collaborative process (proses kolaboratif)

Setelah melewati tiga tahapan di atas, selanjutnya masuk ke proses kolaborasi yang akan menentukan bagaimana mekanisme dalam berkolaborasi. Ada lima proses yang harus dilakukan, antara lain;

- f. Dialog Tatap Muka. Yang dimaksud adalah pertemuan langsung antara organisasi/lembaga yang akan terlibat dalam kolaborasi, yang dilakukan secara formal maupun non formal untuk membahas proses-proses dalam

kolaborasi yang dibangun, serta bagaimana membangun relasi dengan pemerintah dan masyarakat yang ada.

- g. Membangun Kepercayaan. Hal ini sangat penting dalam sebuah kolaborasi, membangun kepercayaan ini dimulai dari bagaimana organisasi/lembaga terkait saling mempercayai satu sama lain, begitu juga dengan pemerintah dan masyarakat.
- h. Komitmen dalam Proses Kolaborasi. Komitmen yang dimaksud adalah tanggung jawab yang harus dipegang oleh masing-masing pihak yang berkolaborasi, komitmen dan kerja sama dalam mencapai apa yang ingin dicapai.
- i. Pemahaman Bersama. Yang dimaksud dengan pemahaman bersama adalah memiliki tujuan bersama yang jelas antar pemerintah yang berkolaborasi dan mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang ingin dicapai.
- j. Hasil akhir. Hasil antara merupakan hasil sementara yang diperoleh atau dicapai dari proses kolaborasi, hasil sementara yang diperoleh dapat menjadi pendorong dalam membangun kepercayaan untuk terus berkolaborasi. Hasil antara ini tidak terlepas dari manfaat apa yang didapatkan oleh komunitas dan organisasi.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang di gunakan dalam proses penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu jenis data empiris yang diperoleh secara langsung dari lapangan, baik melalui wawancara dengan narasumber maupun dokumentasi terkait *collaborative governance* pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Data tersebut kemudian diolah menjadi data utama yang akhirnya menghasilkan kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan konsep teori atau literatur yang ada di perpustakaan, serta sumber-sumber lain yang telah dikelola dan memiliki relevansi dengan masalah penelitian, berupa dokumen-dokumen yang tersedia.

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Data primer dan sekunder adalah sumber informasi yang dikumpulkan untuk membentuk kesimpulan dalam sebuah penelitian. Meskipun keduanya berfungsi sebagai sumber data, cara memperolehnya berbeda.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pengumpulan data secara langsung oleh peneliti di lapangan, dimana informasi diperoleh dari hasil

wawancara mendalam dan observasi berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti. Dalam menentukan informan penelitian yang telah dipilih sebagai sumber data dalam penelitian ini berdasarkan karakteristik tertentu, yaitu mengetahui, memahami, dan terlibat dalam konteks *collaborative governance* pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Kasi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Kelurahan Tondo, Ketua TPS 3R Naroso, RT Kelurahan Tondo.

- b. Data sekunder, merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Hal ini berarti sumber data penelitian diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan dokumen dari berbagai sumber resmi, seperti keputusan perundang-undangan, laporan hasil penelitian, data kelembagaan, foto-foto, dan teks-teks yang terkait dengan *collaborative governance* pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Serta, sumber-sumber lain yang digunakan sebagai referensi untuk membantu peneliti dalam menggambarkan fenomena penelitian.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

pengetahuan tentang metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar data yang ditetapkan. Dilihat dari segi cara atau teknologi pengumpulan data, metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi adalah suatu kegiatan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan tentang suatu fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang telah diketahui sebelumnya. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data, dimana melalui observasi peneliti melakukan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian guna mendapatkan data yang valid dan aktual dari sumber data di lapangan. Teknik ini banyak digunakan, baik dalam penelitian historis (sejarah) maupun deskriptif karena gejala-gejala penelitian dapat diamati dari dekat untuk kemudian dikumpulkan dan dicatat.
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dijadikan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Dengan wawancara, berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh. Berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh. Wawancara dapat dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara

langsung dilakukan dengan orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik mengenai dirinya maupun mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Wawancara tidak langsung dilakukan terhadap seseorang yang dimintai keterangan tentang orang lain. Muhammad Ali dalam Sahya Anggara (2015:113).

3. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis foto-foto, gambar, dan dokumen (catatan) yang dibuat oleh subjek. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelusuran dokumentasi dengan cara mengkaji berbagai literatur atau dokumen lain yang dianggap relevan dengan penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrumen atau perangkat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif merupakan alat bantu manusia yang berfungsi menetapkan prioritas penelitian, memilih sumber informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan.

Sugiyono (2016:60) juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain dari pada menggunakan manusia sebagai alat penelitian utama.

Alasannya masih belum mempunyai bentuk yang pasti. Pertanyaan, prioritas penelitian, prosedur penelitian, asumsi yang digunakan, bahkan hasil aplikasinya, semuanya tidak dapat ditentukan dan ditetapkan terlebih dahulu. Semua itu masih perlu dikembangkan selama proses penelitian berlangsung. Dalam ketidakpastian dan ketidakjelasan itu, tidak ada jalan keluar lain selain peneliti itu sendiri sebagai satu-satunya alat untuk mencapainya.

Salah satu instrumen pada penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, didukung oleh panduan wawancara mendalam dalam pelaksanaan wawancara terhadap informan, dan pedoman pengamatan dalam kegiatan observasi lapangan, adapun alat yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah :

1. Pedoman wawancara.
2. Alat tulis.
3. Alat perekam suara.
4. Alat Dokumentasi.

3.6 Analisis Data

Miles dan Huberman dan Saladana (2014:8) menerangkan bahwa aktivitas analisis data dalam sebuah penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilaksanakan secara berulang-ulang sampai tuntas sehingga datanya dapat dianalisis.

Adapun tahapan dalam analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Mengumpulkan data sebelum penelitian dan setelah penelitian dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi yang ada dengan masalah yang ditemukan di lapangan kemudian data dikembangkan melalui tahap selanjutnya.

2. Kondensasi data

Miles dan Huberman (2014) dalam kondensasi data menuju pada proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksi, dan mentaranformasi data yang di dapatkan dalam catatan di lapangan ataupun transkip dalam sebuah penelitian yang di uraikan sebagai berikut:

- a. Pemilihan, dalam proses pemilihan peneliti harus bergerak selektif, maksudnya yaitu menentukan bagian-bagian mana yang lebih penting. hubungan yang mungkin memiliki makna dan informasi yang didapat kemudian dikumpulkan dan dianalisis.
- b. Pengerucutan, pada tahap ini yaitu pemfokusan data yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian. Tahap ini ialah keberlanjutan pada tahap seleksi data. Dalam hal ini data dalam penelitian dibatasasi karena harus didasarkan pada rumusan masalah.
- c. Peringkasan, pada tahap ini data yang dikumpulkan kemuadian diseleksi khusunya yang berhubungan dengan kualitas data dan cakupan data.
- d. Penyederhanaan dan transformasi, menyederhanakan data yang diperoleh dalam penelitian dan di transformasikan dalam dengan cara seleksi yang ketat

melalui ringkasan atau uraian singkat, mengolongkan data dalam satu pola yang lebih luas.

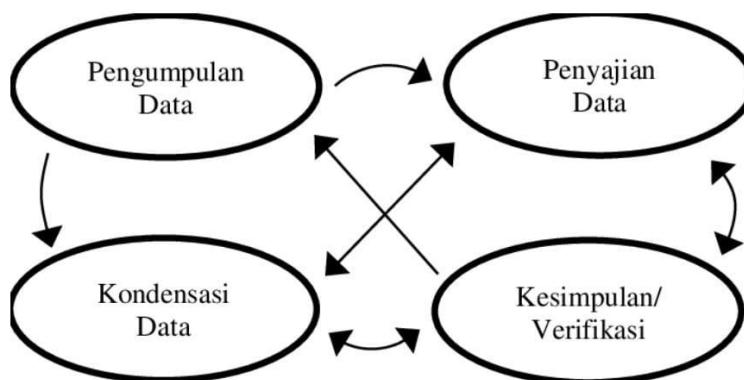
3. Penyajian data

Penyajian data berfungsi agar dalam menyederhanakan data dan informasi yang bersifat umum sehingga lebih mudah untuk dipahami. Peneliti menyajikan data sesuai dengan apa yang diperoleh di lapangan kemudian merencanakan kerja.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu suatu usaha untuk mencari dan memahami alur sebab akibat, pola atau keteraturan, dan makna dari data yang sudah disajikan. Selain itu, penarikan kesimpulan juga merupakan gambaran dari objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara analisis dan mengecek secara berulang dengan bukti yang diperoleh dalam penelitian di lapangan.

Gambar 3.1
Model Interaktif Analisis Data



Sumber : Miles Dan Huberman (2014)

3.7 Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tondo, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, dan TPS 3R Naroso. Karena dianggap relevan dengan objek penelitian serta sesuai dengan judul kajian yang penulis ajukan yaitu *collaborative governance* pengelolaan sampah di kelurahan tondo kecamatan mantikulore kota palu.

3.8 Waktu dan Jadwal Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Oktober 2025.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kelurahan Tondo

4.1.1 Sejarah Kelurahan Tondo

Sejarah Kelurahan Tondo tidak bisa dilepaskan dari sejarah terbentuknya Kota Palu yang sebelumnya memiliki Status wialayah sebagai Kota dalam Swatantra Donggala Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1952. Selanjutnya dihapuslah Pemerintah Swapraja dengan keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 serta Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang terbentuknya Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang ibu kotanya Palu. Kata “Tondo” berasal dari kata “Petondo mbotomo” yang diucapkan seorang tokoh dari kulawi yang biasa di panggil Tomalanggai yang mengusir perompak laut, yang pada saat istirahat anak buahnya bertanya “dimana bekal kita?” Tomalanggai menjawab “Petondo mbotomo”, yang artinya “Lihat sendiri bekal itu” ada di gantung di cabang-cabang pohon. Dari kata inilah asal nama kampung Tondo. Sebelum tanggal 27 September 1978, kampung Tondo telah berubah statusnya menjadi desa Tondo dan termasuk dalam Wilayah Kecamatan Tavaili. Kemudian status sebagai desa berubah menjadi Kelurahan sebagai dampak dari pembentukan Kecamatan Palu menjadi wilayah Administratif Palu Tanggal 27 September 1978 dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1978 serta atas dasar dekontrasi sesuai Undang-undang No. 05 Tahun

1979 tentang Pemerintahan di Desa, daerah Administratif Palu terbagi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Palu Timur, yang mana Kelurahan Tondo termasuk salah satu Kelurahan dari 11 Kelurahan di Kecamatan Palu Timur.

4.1.2 Kondisi Geografis Kelurahan Tondo

Kelurahan Tondo merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Mantikulore Kota Palu, secara geografis Kelurahan Tondo memiliki Luas Wilayah 5.516 Ha. secara astronomis kelurahan tondo berada pada posisi 00°50'35,8 LS dan 119°53' 08,4 BT. Secara administratif, batas-batas kelurahan tondo adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan layana
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan talise
3. Sebelah Barat berabatasan dengan teluk palu
4. Sebelah Timur berbatasan kabupaten Parigi moutong

4.1.3 Kondisi Penduduk Kelurahan Tondo

Kelurahan Tondo memiliki total jumlah penduduk sebanyak 11.210 jiwa pada tahun 2023, yang terdiri dari 5.592 laki-laki dan 5.618 perempuan. Berdasarkan jumlah penduduk dapat dilihat bahwa penduduk yang berjenis kelamin Perempuan dan yang berjenis kelamin laki-laki memiliki presentase yang setara yakni 50% di kelurahan Tondo.

4.1.4 Struktur Organisasi Kelurahan Tondo

Struktur organisasi adalah susunan formal yang menggambarkan bagaimana peran, tanggung jawab, wewenang, dan hubungan antarbagian dalam sebuah organisasi diatur dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan bersama. Sebagaimana kelurahan pada umumnya, Kelurahan Tondo dipimpin oleh seorang lurah dan dibantu dengan ASN kelurahan lainnya. Adapun struktur organisasi di Keluran Tondo sebagai berikut.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Kelurahan Tondo



Sumber : Data sekunder Profil Kelurahan Tondo 2025

4.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

4.2.1 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

Dinas Lingkungan Hidup adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya. Dinas ini berada di bawah naungan Pemerintah Daerah dan memiliki tugas dan fungsi dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.

4.2.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

Struktur organisasi adalah susunan formal yang menggambarkan bagaimana peran, tanggung jawab, wewenang, dan hubungan antar bagian dalam suatu organisasi diatur dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan bersama.

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu



Sumber : Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu 2024

4.3 Gambaran Umum TPS 3R Naroso

4.3.1 Profil TPS 3R Naroso

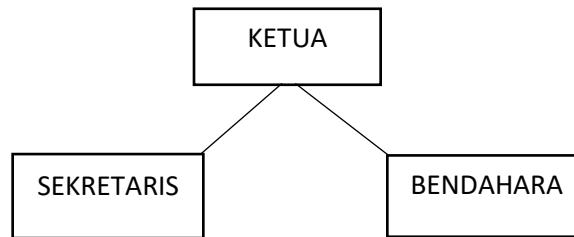
TPS 3R adalah singkatan dari Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle. Sebuah sistem pengelolaan sampah di tingkat masyarakat yang berfokus pada pendekatan 3R Reduce (Mengurangi) Berusaha mengurangi produksi sampah dari sumbernya. Reuse (Menggunakan Kembali) Memanfaatkan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai agar tidak langsung menjadi sampah. Recycle (Mendaur Ulang) Mengolah sampah menjadi produk baru yang bernilai ekonomis. TPS 3R adalah fasilitas yang dibangun untuk mengelola sampah dari rumah tangga di satu area secara terpadu

4.3.2 Struktur Organisasi TPS3R Naroso

Struktur organisasi adalah susunan formal yang menggambarkan bagaimana peran, tanggung jawab, wewenang, dan hubungan antarbagian dalam sebuah organisasi diatur dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan bersama.

Tabel 4.1

Struktur Organisasi TPS 3R Naroso



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil

Collaborative Governance adalah tata kelola pemerintahan yang melibatkan satu atau lebih lembaga pemerintah ataupun non pemerintah secara bersama dalam sebuah proses pembuatan kebijakan yang berlangsung secara formal, berorientasi konsensus, dan konsultatif yang bertujuan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan publik maupun mengelola program dan aset publik (Ansell dan Gash, 2008). Dalam *Collaborative Governance*, dibutuhkan beberapa pihak dalam mewujudkan tujuan dari sebuah kebijakan atau program.

Kelurahan Tondo berkolaborasi bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dan juga TPS 3R naroso dalam bentuk pengelolaan sampah, untuk mewujudkan kolaborasi yang baik maka dari pihak yang terlibat dalam kolaborasi memiliki peran nya masing-masing. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dalam hal ini menyediakan pendanaan untuk keperluan sarana dan prasarana pendukung. Pihak Kelurahan Tondo memiliki peran sebagai pengawas dalam pengelolaan sampah. TPS 3R naroso bertugas menjadi pihak yang mengelola sampah. RT yang berada di Kelurahan Tondo memiliki peran mengawasi masyarakat nya agar membuang sampah pada tempat yang telah di sediakan.

5.1.1 *starting condition* (kondisi awal)

Kondisi awal merupakan salah satu indikator utama yang mempengaruhi proses kolaborasi yang akan dijalin, dapat menjadi pendukung maupun penghambat kerjasama, serta dapat mengukur apakah *collaborative governance* yang dilakukan oleh pihak yang bekerjasama sesuai dengan apa yang diinginkan. Kondisi awal adalah kondisi dimana para pelaku kepentingan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bekerjasama baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang terkait fenomena seperti mempunya visi dan misi serta kepentingan bersama yang akan dicapai, Ada tiga variabel besar yang ingin dicapai dari tahap kondisi awal yaitu, ketidakseimbangan antara pengaruh/kekuatan, sejarah masa lalu, serta bentuk dorongan dan hambatan dalam mengikuti kolaborasi.

Sebagaimana hasil wawancara bersama bapak IM Selaku sekretaris dinas lingkungan hidup kota palu mengenai *starting condition* (kondisi awal) dalam *collaborative governance* pengelolaan sampah:

“Ya, untuk kolaborasi dalam pengelolaan sampah di kelurahan tondo di latar belakangi karna kelurahan tersebut memiliki kepadatan penduduk yang tinggi yang berpengaruh juga dalam peningkatan jumlah produksi sampah apalagi di situ hanya memiliki 2 armada. Adapun sebelum kolaborasi ini di bentuk untuk sampah di kelurahan tondo di tangani langsung oleh masyarakat namun di tumpuk pada satu tempat sehingga memunculkan masalah baru, maka dari itu di bentuk lah kerja sama untuk mengatasi sampah tersebut walau masih ada sisa-sisa” (wawancara 14 juli 2025).

Berdasarkan hasil analisis bahwa kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo muncul sebagai respons terhadap tingginya kepadatan penduduk yang berbanding lurus dengan peningkatan volume sampah, sementara sarana pengangkutan hanya terbatas pada dua armada. Sebelum adanya kolaborasi, pengelolaan sampah dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan cara menumpuk sampah di satu titik, namun hal ini justru menimbulkan persoalan baru seperti penumpukan dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, dibentuklah kerja sama antar pihak untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih terorganisir, meskipun masih terdapat kendala berupa sisa-sisa sampah yang belum sepenuhnya teratasi.

Selanjutnya, hasil wawancara bersama bapak VE selaku Kasi Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum menyatakan bahwa:

”Iya, untuk yang melatarbelakangi .kolaborasi ini karna kami melihat di kelurahan tondo ini masalah sampah sudah terlalu kompleks untuk di tangani sendiri apalagi di tambah dengan keluasan dan kepadatan penduduk di sini, maka dari itu kami melakukan kolaborasi dalam mengelola sampah supaya masalah sampah di sini bisa di atasi. Sebelum adanya kolaborasi kami di sini cukup kewalahan mengatasi masalah sampah karena produksi sampah yang tinggi di tambah dengan terbatas nya armada sampah di kelurahan tondo adapun TPS 3R masih berjalan sendiri sehingga belum terlalu aktif seperti sekarang” (wawancara 18 juli 2025).

Dari hasil analisis bahwa latar belakang terbentuknya kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo adalah karena permasalahan sampah yang semakin

kompleks akibat luas wilayah dan tingginya kepadatan penduduk. Kondisi ini menimbulkan volume sampah yang tinggi, sementara sarana pendukung seperti armada pengangkut sangat terbatas. Sebelum adanya kolaborasi, pihak kelurahan merasa kewalahan dalam mengatasi masalah sampah, terlebih karena TPS 3R saat itu masih berjalan sendiri dan belum aktif berperan. Oleh sebab itu, kolaborasi dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan sampah secara lebih terorganisir dan efektif guna mengurangi beban yang sebelumnya ditanggung secara sepihak.

Selanjutnya, hasil wawancara bersama ibu A selaku ketua TPS 3R Naroso menyatakan bahwa:

“Sebelum ada nya TPS 3R sampah ada dimana-mana karena belum tempat pembuangan atau pemilahan dan juga dulu masyarakat tidak tau sampah itu ada nilai nya” (wawancara 08 agustus 2025)

Berdasarkan hasil analisis bahwa sebelum adanya TPS 3R, permasalahan sampah di Kelurahan Tondo sangat serius karena tidak adanya tempat pembuangan maupun pemilahan yang terorganisir, sehingga sampah sering berserakan di berbagai lokasi. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai nilai ekonomis dari sampah membuat pengelolaan sampah tidak optimal dan hanya dipandang sebagai limbah yang harus dibuang. Kehadiran TPS 3R kemudian menjadi solusi penting, karena tidak hanya menyediakan sarana pengelolaan dan pemilahan sampah, tetapi

juga meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa sampah memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan kembali.

Kemudian, hasil wawancara bersama bapak B selaku RT 01huntrap tondo menyatakan bahwa:

“Sebelum ada kolaborasi itu, kondisi pengelolaan sampah di Tondo masih kacau. orang biasa cuman kumpul sampah di satu tempat, kadang buang sembarang di jalan jadi bikin kotor lingkungan”(wawancara 13 agustus 2025).

Kemudian, hasil wawancara bersama bapak H selaku RT 03 huntrap tondo menyatakan bahwa:

“Dulu sebelum ada kolaborasi masyarakat di huntrap sini buang sampah seenaknya dimana ada tumpukan sampah pasti di buangnya juga di situ”(wawancara 13 agustus 2025)

Berdasarkan hasil analisis bahwa sebelum adanya kolaborasi, kondisi pengelolaan sampah di Tondo masih sangat tidak teratur. Masyarakat cenderung membuang sampah secara sembarangan, baik dengan menumpuknya di satu titik maupun membuangnya di jalan, sehingga menimbulkan tumpukan baru yang memperburuk kondisi lingkungan. Kebiasaan ini menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik serta ketiadaan sistem yang jelas dalam penanganannya. Akibatnya, lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat, yang kemudian mendorong perlunya kolaborasi untuk menciptakan solusi bersama.

Tabel 5.1 Persepsi Informan Tentang *Starting Condition*

indikator	Sekretaris DLH	Pegawai Kelurahan	Ketua TPS 3R	RT 01	RT 03
<i>starting condition</i> (kondisi awal)	Kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo muncul karena tingginya kepadatan penduduk yang meningkatkan volume sampah. Sebelum ada kolaborasi, sampah ditangani langsung oleh masyarakat dengan cara ditumpuk di satu tempat.	Kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo dilakukan karena masalah sampah sudah terlalu kompleks akibat kepadatan penduduk dan luas wilayah, sementara armada pengangkut terbatas	Sebelum ada TPS 3R, sampah sering berserakan karena belum ada tempat pembuangan atau pemilahan.	Sebelum ada kolaborasi, pengelolaan sampah di Tondo masih kacau.	Dulu, sebelum ada kolaborasi, masyarakat di huntap membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan data dokumen dapat di simpulkan Kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo lahir sebagai respons atas meningkatnya volume sampah akibat kepadatan penduduk, luas wilayah, dan terbatasnya armada pengangkut. Sebelum adanya kolaborasi pengelolaan sampah belum berjalan secara maksimal, warga masih menumpuk atau membuang sampah sembarangan, sehingga menimbulkan pencemaran dan lingkungan yang kotor. Kehadiran kolaborasi pengelolaan sampah menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih terorganisir, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa sampah memiliki nilai guna.

5.1.2 *institutional design* (desain kelembagaan)

Desain kelembagaan mengacu pada aturan-aturan dasar dalam kolaborasi antara pihak yang berkolaborasi dan telah di sepakati bersama oleh pemangku kepentingan.

Sebagaimana hasil wawancara bersama bapak IM Selaku sekretaris dinas lingkungan hidup kota palu mengenai *institutional design* (desain kelembagaan) dalam *collaborative governance* pengelolaan sampah:

“Untuk aturan dalam kolaborasi ini mengacu pada perda provinsi Sulawesi tengah nomor 5 tahun 2021 tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan untuk prosedur dalam kolaborasi masih berlandaskan pada aspek tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat” (wawancara 14 juli 2025).

Dari hasil analisis bahwa aturan dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak berjalan tanpa acuan, melainkan mengikuti regulasi yang berlaku. Sementara itu, prosedur pelaksanaannya lebih menekankan pada pembagian tanggung jawab sesuai peran masing-masing pihak yang terlibat. Dengan demikian, keberhasilan kolaborasi ini sangat bergantung pada komitmen dan kesadaran para pihak untuk menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten dalam kerangka aturan yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya, hasil wawancara bersama bapak VE selaku Kasi Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum menyatakan bahwa:

“Terus terang saja kalau dibilang aturan formal yang atur kolaborasi ini nda terlalu jelas. Ada memang perwali dari kota soal kebersihan tapi kalau di tondo kita belum punya prosedur khusus, Adapun hanya sebatas SK yang berisikan nama pengurus dan program-program yang di jalankan”(wawancara 18 juli 2025).

Berdasarkan hasil analisis bahwa aturan formal yang mengatur kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo masih belum jelas dan terstruktur. Meskipun terdapat Perwali dari kota yang mengatur soal kebersihan, di tingkat kelurahan belum ada prosedur khusus yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaannya. Kolaborasi yang berjalan selama ini hanya berlandaskan pada Surat Keputusan (SK) yang memuat nama-nama pengurus serta program-program yang

dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kolaborasi masih bersifat sederhana dan belum memiliki dasar aturan operasional yang kuat, sehingga keberlangsungannya sangat bergantung pada inisiatif dan kesepakatan internal para pihak yang terlibat.

Selanjutnya, hasil wawancara bersama ibu A selaku ketua TPS 3R Naroso menyatakan bahwa:

”Untuk aturan dalam kolaborasi kita tidak ada,kami di sini hanya berlandaskan dengan perda kota palu nomor 3 tahun 2016”
(wawancara 8 agustus 2025)

Dari hasil analisis bahwa aturan dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo pada dasarnya belum memiliki ketentuan khusus yang mengatur secara rinci. Selama ini, pelaksanaan kolaborasi hanya berlandaskan pada Perda Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 sebagai payung hukum umum terkait kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum, namun belum ada aturan teknis atau prosedur spesifik yang secara langsung mengatur mekanisme kolaborasi di tingkat kelurahan, sehingga praktiknya lebih bergantung pada pemahaman serta kesepakatan bersama antar pihak yang terlibat.

Selanjutnya, hasil wawancara bersama bapak B selaku RT 01 huntuap tondo mengakatan bahwa:

“Kalau ditanya soal aturan formal itu, kita sebagai RT di sini belum ada aturan yang tertulis. Biasanya kita cumin di himbaua dari

kelurahan atau Dinas Lingkungan Hidup, tapi itu lebih kayak arahan biasa.”(wawancara 13 agustus 2025).

Kemudian, hasil wawancara bersama bapak H selaku RT 03 hantap tondo mengatakan bahwa:

”Untuk aturan resmi kolaborasi tidak ada saya cuman mengikuti arahan yang di berikan.”(wawancara 13 agustus 2025).

Dapat di analisis bahwa kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sampah belum ada aturan formal yang tertulis sebagai dasar kolaborasi, melainkan hanya berupa himbauan dari kelurahan maupun Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek desain kelembagaan menurut teori Ansell & Gash masih lemah, karena belum tersedia pedoman resmi yang dapat menjadi acuan bersama. Akibatnya, kolaborasi lebih bergantung pada arahan sepihak dan kesadaran masyarakat, sehingga pelaksanaannya kurang konsisten.

Tabel 5.2 Persepsi Informan Tentang *Intitutional Design*

indikator	Sekretaris DLH	Pegawai Kelurahan	Ketua TPS 3R	RT 01	RT 03
<i>institutional design</i> (desain kelembagaan)	Aturan dalam kolaborasi ini mengacu pada Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Aturan formal yang mengatur kolaborasi ini belum jelas. Memang ada Peraturan Wali Kota mengenai kebersihan.	Dalam kolaborasi ini belum ada aturan khusus. Dasar yang digunakan hanya Perda Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016.	Belum ada aturan formal tertulis terkait kolaborasi pengelolaan sampah. Arahan yang ada hanya berupa himbauan dari kelurahan atau Dinas Lingkungan Hidup	Tidak ada aturan resmi dalam kolaborasi pengelolaan sampah RT hanya mengikuti arahan.

Berdasarkan hasil oberservasi, wawancara, dan data dokumen dapat disimpulkan bahwa aturan dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo pada dasarnya memiliki dasar hukum melalui Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021 serta Perda Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016, yang menjadi payung regulasi umum terkait perlindungan lingkungan dan kebersihan. Namun, hingga kini belum tersedia ketentuan teknis atau aturan khusus yang secara rinci mengatur mekanisme kolaborasi.

5.1.3 *facilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif)

Kepemimpinan fasilitatif merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam sebuah forum yang dibentuk, pemimpin sebagai mediator atau individu yang bertugas untuk memimpin sebuah forum, dibutuhkan kepemimpinan yang dapat dihormati dan dipercaya oleh semua stakeholder. Dalam hal ini membahas tentang bagaimana cara meyakinkan para stackholder tentang kolaborasi dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah dan dapat menjadi mediator dalam kolaborasi yang dibangun.

Sebagaimana hasil wawancara bersama bapak IM Selaku sekretaris dinas lingkungan hidup kota palu mengenai *facilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif) dalam *collaborative governance* pengelolaan sampah:

“Dalam kolaborasi ini, ada beberapa pihak yang berperan sebagai mediator seperti korlur, dan RT/RW” (wawancara 14 juli 2025).

Berdasarkan hasil analisis bahwa dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo terdapat pihak-pihak yang berperan sebagai mediator, yaitu koordinator kelurahan (korlur) serta RT/RW. Kehadiran mediator ini sangat penting karena berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pihak pengelola, sekaligus memastikan koordinasi dan komunikasi berjalan lancar. Peran mediator juga membantu menyelesaikan permasalahan di lapangan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menjaga agar setiap program yang dijalankan dapat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan setempat.

Selanjutnya, hasil wawancara bersama bapak VE selaku Kasi Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum menyatakan bahwa:

“Kalau soal mediator, ya di sini yang banyak ambil peran itu kelurahan sendiri. Kita yang jadi penghubung antara pihak-pihak yang berkolaborasi. Biasanya kalau ada program atau kegiatan, informasi dan koordinasinya lewat kelurahan. Kadang juga kita minta bantuan RT/RW jadi penghubung di lapangan, karena mereka lebih dekat sama warga.” (wawancara 18 juli 2025).

Dari hasil analisis bahwa peran mediator dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo lebih banyak dijalankan oleh pihak kelurahan sebagai penghubung utama antar pihak yang terlibat. Kelurahan menjadi pusat koordinasi sekaligus penyampai informasi terkait program atau kegiatan yang dilaksanakan. Namun, dalam praktiknya kelurahan juga melibatkan RT/RW sebagai perpanjangan tangan di lapangan, mengingat kedekatan mereka dengan warga sehingga komunikasi dan pelaksanaan program dapat lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan

mediator baik kelurahan maupun RT/RW sangat penting untuk memperlancar jalannya kolaborasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, hasil wawancara bersama ibu A selaku ketua TPS 3R Naroso menyatakan bahwa:

”yang biasa jadi mediator biasa lurah atau perangkat kelurahan mereka yang jadi penghubung antara masyarakat, TPS 3R, sama dinas terkait. Tapi kadang ketua TPS 3R juga berperan sebagai mediator dari masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah”(wawancara 08 agustus 2025)

Berdasarkan hasil analisis bahwa mediator dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo umumnya adalah lurah atau perangkat kelurahan yang berperan sebagai penghubung utama antara masyarakat, TPS 3R, dan dinas terkait. Peran ini penting untuk memastikan komunikasi dan koordinasi berjalan efektif antar pihak. Namun, dalam situasi tertentu ketua TPS 3R juga turut berperan sebagai mediator, khususnya dalam menyampaikan keluhan atau aspirasi masyarakat terkait pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi mediator tidak hanya terpusat pada pihak kelurahan, tetapi juga dapat dijalankan oleh pengelola TPS 3R demi memperkuat hubungan dan meningkatkan respon terhadap kebutuhan warga.

Selanjutnya, hasil wawancara bersama bapak B selaku RT 01 hantap tondo mengatakan bahwa:

“Tentu nya yang menjadi mediator dari pihak kelurahan”(wawancara 13 agustus 2025).

Kemudian, hasil wawancara bersama bapak H selaku RT 03 hantap tondo mengatakan bahwa:

”Yang menjadi mediator TPS 3R bersama kelurahan”(wawancara 13 agustus 2025)

Dapat dianalisis bahwa peran mediator dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Tondo dijalankan oleh pihak kelurahan bersama TPS 3R. Hal ini menunjukkan bahwa kelurahan tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penghubung antara masyarakat, TPS 3R, dan Dinas Lingkungan Hidup. Kehadiran TPS 3R sebagai mediator bersama kelurahan juga memperlihatkan bahwa proses komunikasi dan koordinasi lebih dekat dengan masyarakat, karena TPS 3R beroperasi langsung di lapangan. Dengan demikian, pola mediasi ini memperkuat kerja sama antar pihak sekaligus mempermudah penyelesaian masalah teknis yang muncul di tingkat masyarakat. Namun, kondisi ini juga menuntut adanya sinergi yang baik agar fungsi mediasi berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih peran.

Tabel 5.3 Persepsi Informan Tentang Facilitative Leadership

indikator	Sekretaris DLH	Pegawai Kelurahan	Ketua TPS 3R	RT 01	RT 03
<i>facilitative leadership</i> (kepemimpinan fasilitatif)	Dalam kolaborasi ini terdapat pihak yang berperan sebagai mediator, yaitu Koordinator Kelurahan (Korlur) serta RT/RW.	Mediator utama dalam kolaborasi ini adalah Kelurahan, yang berperan sebagai penghubung antar pihak.	Mediator dalam kolaborasi ini biasanya adalah lurah atau perangkat kelurahan yang menjadi penghubung antara masyarakat.	Mediator dalam kolaborasi ini adalah pihak kelurahan, yang berperan sebagai penghubung antar pihak yang terlibat.	Mediator dalam kolaborasi ini adalah TPS 3R bersama Kelurahan, yang berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan dinas terkait.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan data dokumen dapat di simpulkan peran mediator dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo sangat penting karena berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat, TPS 3R, dan Dinas Lingkungan Hidup. Mediator dijalankan oleh Kelurahan Tondo sebagai pusat koordinasi, dibantu RT/RW yang lebih dekat dengan warga, serta ketua TPS 3R dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Kehadiran mediator ini memastikan komunikasi dan koordinasi berjalan lancar, membantu penyelesaian masalah di lapangan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

5.1.4 *collaborative process* (proses kolaboratif)

Proses kolaborasi merupakan inti dari model kolaborasi. Proses kolaborasi digambarkan sebagai tahap pengembangan kesepakatan yang menjelaskan bagaimana fase-fase program kolaborasi dijalankan. Proses kolaborasi adalah proses yang membahas mengenai dialog yang dilakukan dengan partisipasi pemangku kepentingan untuk mendapatkan keputusan bersama yang disepakati. Kolaborasi tergantung pada bagaimana siklus kolaborasi ini berputar mulai dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pemahaman bersama, dan hasil antara

5.1.4.1 Dialog Tatap Muka

Dialog Tatap Muka. Yang dimaksud adalah pertemuan langsung antara organisasi/lembaga yang akan terlibat dalam kolaborasi, yang dilakukan secara formal maupun non formal untuk membahas proses-proses dalam kolaborasi yang

dibangun, serta bagaimana membangun relasi dengan pemerintah dan masyarakat yang ada.

Sebagaimana hasil wawancara bersama bapak IM Selaku sekretaris dinas lingkungan hidup kota palu mengenai dialog tatap muka dalam *collaborative governance* pengelolaan sampah:

“Ya, Ketika terjadi masalah maka kita turun sama-sama untuk mendiskusi kan masalah tersebut. Selain itu, di kelurahan juga melakukan pertemuan rutin setiap sebulan sekali untuk membahas dan mengevaluasi terkait pengelolaan sampah yang melibatkan korcam, korlur, dan masyarakat. Adapun kami dari DLH akan ikut serta jika di beri undangan karena memang sudah ada korlur yang mengatasi masalah tersebut”(wawancara 14 juli 2025).

Dari hasil analisis bahwa mekanisme penyelesaian masalah dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo dilakukan melalui musyawarah bersama. Ketika muncul permasalahan, semua pihak turun langsung untuk mendiskusikan solusi yang tepat. Selain itu, kelurahan juga secara rutin mengadakan pertemuan bulanan yang melibatkan korcam, korlur, dan masyarakat guna membahas serta mengevaluasi jalannya pengelolaan sampah. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) turut berperan apabila diundang, meskipun sebagian besar masalah teknis sudah ditangani oleh korlur. Hal ini menunjukkan adanya sistem koordinasi yang cukup baik dengan pembagian peran yang jelas, sehingga proses pengelolaan dan evaluasi dapat berjalan lebih terarah.

Selanjutnya, hasil wawancara bersama bapak VE selaku Kasi Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum menyatakan bahwa:

“Untuk dialog tatap muka atau pertemuan kami di sini melakukan pada saat ingin menjalankan suatu program jadi di pertemuan kami membahas apa yang akan di jalankan serta apa-apa saja kendala yang mungkin di hadapi”(wawancara 18 juli 2025)

Berdasarkan hasil analisis bahwa pertemuan tatap muka dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo dilakukan secara fungsional, yaitu ketika akan menjalankan suatu program. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk membahas rencana kegiatan sekaligus mengidentifikasi potensi kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa dialog tatap muka berperan penting sebagai sarana koordinasi, perencanaan, serta antisipasi masalah, sehingga program yang dijalankan dapat lebih terarah dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selanjutnya, hasil wawancara bersama ibu A selaku ketua TPS 3R Naroso menyatakan bahwa:

“Kalau untuk komunikasi seminggu bisa 2 kali tapi hanya dengan lurah atau pihak kelurahan tapi untuk komunikasi dengan pihak DLH hanya jika ada yang penting untuk di bahas”(wawancara 08 agustus 2025)

Dari hasil analisis bahwa pola komunikasi dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo berlangsung cukup intensif, khususnya antara masyarakat atau pengelola dengan lurah maupun pihak kelurahan yang bisa dilakukan

hingga dua kali dalam seminggu. Pola ini menunjukkan adanya koordinasi yang rutin dan dekat di tingkat lokal. Sementara itu, komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hanya dilakukan jika terdapat hal penting yang perlu dibahas, menandakan bahwa DLH lebih berperan pada isu strategis atau permasalahan yang membutuhkan dukungan teknis dan kebijakan. Dengan demikian, komunikasi yang terjalin bersifat berlapis sesuai dengan tingkat kebutuhan dan peran masing-masing pihak.

Kemudian, hasil wawancara bersama bapak B selaku RT 01 hantap tondo mengatakan bahwa:

“Kalau untuk di libatkan pertemuan saya pernah, kita biasa melakukan rapat terkait pengelolaan sampah di balai kelurahan tondo”(wawancara 13 agustus 2025).

Selanjutnya, hasil wawancara bersama bapak H selaku RT 03 hantap tondo mengatakan bahwa:

“Ya, biasa di adakan rapat terkait pengelolaan sampah yang melibatkan kelurahan tondo, TPS 3R, Dan juga RT”(wawancara 13 agustus 2025)

Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo dilakukan melalui musyawarah bersama. Rapat biasanya dilaksanakan di balai kelurahan dan melibatkan beberapa pihak, yakni kelurahan Tondo, TPS 3R, serta perwakilan RT. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan adanya pola partisipatif dalam menentukan langkah pengelolaan

sampah, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih inklusif dan mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Tabel 5.4 Persepsi Informan Tentang Dialog Tatap Muka

indikator	Sekretaris DLH	Pegawai Kelurahan	Ketua TPS 3R	RT 01	RT 03
<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif) aspek dialog tatap muka	Jika terjadi masalah, pihak terkait akan turun bersama untuk mendiskusikannya. Selain itu, kelurahan mengadakan pertemuan rutin setiap bulan untuk membahas dan mengevaluasi pengelolaan sampah.	Pertemuan tatap muka biasanya dilakukan saat akan menjalankan suatu program. Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana kegiatan serta kendala yang mungkin dihadapi.	Komunikasi dilakukan sekitar dua kali seminggu dengan lurah atau pihak kelurahan, sedangkan dengan DLH hanya dilakukan jika ada hal penting yang perlu dibahas.	Saya pernah dilibatkan dalam pertemuan, biasanya melalui rapat terkait pengelolaan sampah yang dilaksanakan di Balai Kelurahan Tondo.	Pernah diadakan rapat terkait pengelolaan sampah yang melibatkan Kelurahan Tondo, TPS 3R, dan RT.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan data dokumen dapat di simpulkan bahwa mekanisme dialog tatap muka dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo dijalankan melalui musyawarah bersama yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari kelurahan, korlur, RT/RW, hingga masyarakat. Pertemuan rutin, baik bulanan maupun fungsional saat akan menjalankan program, menjadi wadah penting untuk membahas kendala sekaligus mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Pola komunikasi yang terjalin cukup intensif di tingkat lokal, terutama antara masyarakat dan pihak kelurahan. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) lebih banyak dilibatkan pada isu strategis atau persoalan yang membutuhkan dukungan teknis. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi yang terarah, peran yang jelas, serta sistem komunikasi yang efektif, sehingga kolaborasi dapat berjalan lebih terstruktur dan responsif terhadap masalah di lapangan.

Gambar 5.1 Pelaksanaan Dialog Tatap Muka



5.1.4.2 Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan dalam kolaborasi dapat membangun sebuah kepercayaan antara pihak yang berkolaborasi akan mencapai sebuah keberhasilan yang nyata. Buruknya rasa percaya antar stakeholder memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan semata tentang negoisasi, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya.

Sebagaimana hasil wawancara bersama bapak IM Selaku sekretaris dinas lingkungan hidup kota palu mengenai membangun kepercayaan dalam *collaborative governance* pengelolaan sampah:

“Iya, tentu saja kami saling percaya dalam kolaborasi pengelolaan sampah ini. Adapun belum optimal hal itu di karenakan kelurahan tondo yang cukup luas di tambah tingginya kepadatan penduduk serta terbatas nya transportasi mengangkut sampah”(wawancara 14 juli 2025)

Berdasarkan hasil analisis bahwa kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo dibangun atas dasar saling percaya antar pihak yang terlibat. Namun, pelaksanaannya belum berjalan optimal karena adanya hambatan struktural, seperti luasnya wilayah kelurahan, tingginya kepadatan penduduk, serta keterbatasan sarana transportasi untuk mengangkut sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kepercayaan menjadi modal sosial penting dalam menjaga keberlangsungan

kolaborasi, keterbatasan fasilitas dan faktor geografis tetap menjadi tantangan utama yang perlu diatasi agar pengelolaan sampah dapat lebih efektif.

Selanjutnya, hasil wawancara bapak VE selaku Kasi Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum menyatakan bahwa:

“Kalau soal saling percaya sebenarnya ada tapi jujur masih naik-turun. Di awal kolaborasi semua semangat dan saling percaya tapi makin lama kalau ada janji yang nda ditepati atau tugas yang molor, ya mulai muncul rasa ragu. Ada juga pihak yang maunya jalan sendiri, nda mau terlalu ikut aturan bersama tapi kita selalu coba jaga komunikasi duduk rapat ketika ada masalah”(wawancara 18 juli 2025)

Dari hasil analisis bahwa tingkat kepercayaan dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo bersifat fluktuatif. Pada awalnya, semua pihak menunjukkan semangat dan rasa saling percaya yang tinggi, namun seiring berjalannya waktu muncul keraguan ketika ada janji yang tidak ditepati atau tugas yang terlambat dilaksanakan. Selain itu, terdapat pihak yang cenderung ingin berjalan sendiri tanpa mengikuti aturan bersama, sehingga memengaruhi kekompakan dalam kolaborasi. Meski demikian, upaya menjaga komunikasi melalui rapat dan musyawarah terus dilakukan sebagai mekanisme penyelesaian masalah dan pemulihan kepercayaan antar pihak.

Selanjutnya, hasil wawancara bersama ibu A selaku ketua TPS 3R Naroso menyatakan bahwa:

“Dalam pengelolaan sampah pihak-pihak yang berkolaborasi pasti memiliki rasa percaya. ini bisa kita lihat dari kesediaan kelurahan, dinas lingkungan hidup berbagi peran dan terbuka dalam komunikasi”(wawancara 08 agustus 2025)

Berdasarkan hasil analisis bahwa kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo didasari oleh adanya rasa saling percaya antar pihak yang terlibat. Hal ini tercermin dari kesediaan kelurahan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk berbagi peran sesuai tanggung jawab masing-masing serta keterbukaan dalam menjalin komunikasi. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting yang memungkinkan koordinasi berjalan lebih efektif, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mengatasi permasalahan sampah secara berkelanjutan

Kemudian, hasil wawancara bersama bapak B selaku RT 01 huntap tondo mengatakan bahwa:

“Tentunya kami memberi rasa percaya kepada pihak yang berkolaborasi agar kelurahan tondo bisa bersih dari sampah”(wawancara 13 agustus 2025).

Selanjutnya, hasil wawancara bersama bapak H selaku RT 03 huntap tondo mengatakan bahwa:

“Rasa percaya saya kepada pihak yang berkolaborasi tentunya sangat percaya karena memiliki tujuan yang baik”(wawancara 13 agustus 2025).

Dapat dianalisis bahwa kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo dibangun atas dasar rasa saling percaya antar pihak yang terlibat. Rasa percaya ini muncul karena adanya tujuan bersama, yaitu mewujudkan lingkungan kelurahan

yang bersih dan sehat dari sampah. Kepercayaan yang tinggi menjadi modal sosial penting dalam memperkuat kerja sama, karena dengan adanya keyakinan terhadap niat baik pihak lain, koordinasi dan pembagian peran dapat berjalan lebih lancar.

Tabel 5.5 Persepsi Informan Tentang Membangun Kepercayaan

indikator	Sekretaris DLH	Pegawai Kelurahan	Ketua TPS 3R	RT 01	RT 03
<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif) aspek membangun kepercayaan	Dalam kolaborasi pengelolaan sampah, semua pihak saling percaya. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena wilayah Kelurahan Tondo cukup luas.penduduk padat, serta keterbatasan sarana transportasi untuk mengangkut sampah.	Rasa saling percaya memang ada, tetapi masih fluktuatif. Pada awal kolaborasi semua pihak bersemangat, namun seiring waktu muncul keraguan ketika ada janji yang tidak ditepati atau tugas yang tertunda..	Dalam pengelolaan sampah, pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki rasa saling percaya. Hal ini terlihat dari kesediaan Kelurahan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk berbagi peran.	Pihak yang berkolaborasi saling memberi kepercayaan agar Kelurahan Tondo dapat terjaga kebersihannya dari sampah.	Rasa percaya kepada pihak yang berkolaborasi sangat besar, karena semuanya memiliki tujuan yang baik.

Berdasarkan hasil oberservasi, wawancara, dan data dokumen dapat disimpulkan bahwa kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo dibangun atas dasar rasa saling percaya antar pihak yang terlibat, terutama antara Kelurahan Tondo, Dinas Lingkungan Hidup, dan TPS 3R Naroso. Rasa percaya ini terlihat dari adanya kesediaan untuk berbagi peran sesuai tanggung jawab masing-masing serta keterbukaan dalam menjalin komunikasi. Namun, tingkat kepercayaan tersebut Pada awalnya, semangat dan rasa saling percaya sangat tinggi, tetapi seiring waktu sempat menurun akibat adanya janji yang tidak ditepati atau tugas yang terlambat dilaksanakan. Selain itu, hambatan struktural seperti luas wilayah, tingginya kepadatan penduduk, dan terbatasnya sarana transportasi juga memengaruhi efektivitas kolaborasi. Dengan demikian, keberlangsungan kolaborasi sangat ditentukan oleh konsistensi komitmen, keterbukaan, dan pemenuhan tanggung jawab dari setiap pihak.

5.1.4.3 Komitmen Pada Proses

Komitmen yang dimaksud adalah tanggung jawab yang harus dipegang oleh masing-masing pihak yang berkolaborasi, kerja sama dalam mencapai apa yang ingin dicapai.

Sebagaimana hasil wawancara bersama bapak IM Selaku sekretaris dinas lingkungan hidup kota palu mengenai komitmen dalam proses dalam *collaborative governance* pengelolaan sampah:

“Tanggung jawab yang kami pegang adalah jika ada permasalahan dalam pengelolaan sampah, kami pihak yang terlibat dalam kolaborasi ini akan menyelesaikan nya bersama-sama, ya istilah nya sistem keroyokan”(wawancara 14 juli agustus 2025).

Dari hasil analisis bahwa komitmen utama dalam kolaborasi pengelolaan sampah adalah menyelesaikan setiap permasalahan secara bersama-sama dengan prinsip kebersamaan atau yang diistilahkan sebagai “sistem keroyokan.” Hal ini mencerminkan adanya rasa tanggung jawab kolektif dari pihak-pihak yang terlibat, sehingga tidak ada beban yang ditanggung secara sepihak. Komitmen ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi dibangun di atas solidaritas dan gotong royong, yang menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Selanjutnya, hasil wawancara bersama bapak VE selaku Kasi Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum menyatakan bahwa:

”soal tanggung jawab di awal semangat, tapi makin lama beberapa pihak mulai jarang ikut kegiatan. Soal nya dana juga jadi tantangan, karena kegiatan pengelolaan sampah ini butuh biaya, sementara anggarannya terbatas”(wawancara 18 juli 2025)

Berdasarkan hasil analisis bahwa komitmen dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo mengalami penurunan seiring waktu. Pada awalnya semangat partisipasi tinggi, namun kemudian beberapa pihak mulai jarang terlibat dalam kegiatan. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah keterbatasan dana, karena pengelolaan sampah membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit, sementara anggaran yang tersedia sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa

keberlanjutan komitmen tidak hanya bergantung pada semangat awal, tetapi juga pada dukungan sumber daya yang memadai untuk menjaga konsistensi keterlibatan semua pihak.

Selanjutnya, hasil wawancara bersama ibu A selaku ketua TPS 3R Naroso menyatakan bahwa:

“Tentunya kita berusaha bagaimana sampah itu bisa berkurang namun kita selalu mengalami kendala dalam mengolah Kembali sampah seperti terbatas nya alat di sini”(wawancara 08 agustus 2025)

Dari hasil analisis bahwa upaya pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo sudah diarahkan pada pengurangan volume sampah melalui proses pengolahan kembali. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan alat yang tersedia. Keterbatasan sarana ini menyebabkan pengolahan sampah belum optimal, sehingga tujuan untuk meminimalisir jumlah sampah yang menumpuk belum sepenuhnya tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran dan usaha dari pihak terkait, keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada dukungan fasilitas yang memadai.

Kemudian, hasil wawancara bersama bapak B selaku RT 01 huntas tondo mengatakan bahwa:

“Iya, karna bisa di lihat TPS 3R Naroso itu sudah berjalan dengan baik dan juga warga sudah mulai tidak buang sampah sembarangan walaupun tetap ada saja warga yang masih nakal”(wawancara 13 agustus 2025).

Selanjutnya, hasil wawancara bersama bapak H selaku RT 03 huntas tondo mengatakan bahwa:

“Bisa dilihat dari TPS 3R di huntap tahun 2021 TPS 3R masih berjalan dengan belum maksimal tapi semenjak pihak kelurahan tondo dan DLH kerja TPS 3R sudah mulai berjalan baik walaupun masih ada beberapa kendala”(wawancara 13 agustus 2025)

Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa keberadaan TPS 3R Naroso memberikan dampak positif terhadap pengelolaan sampah di Huntap Tondo. Hal ini terlihat dari perubahan perilaku masyarakat yang mulai tidak lagi membuang sampah sembarangan, meskipun masih ada sebagian kecil warga yang belum disiplin. Pada awal beroperasi tahun 2021, TPS 3R dinilai belum berjalan maksimal, namun setelah adanya dukungan dan kerja sama dengan pihak kelurahan Tondo serta DLH, kinerjanya semakin baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar pihak berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, meskipun masih dihadapkan pada kendala tertentu yang perlu terus dievaluasi dan dicari solusinya.

Tabel 5.6 Persepsi Informan Tentang Komitmen Pada Proses

indikator	Sekretaris DLH	Pegawai Kelurahan	Ketua TPS 3R	RT 01	RT 03
<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif) aspek komitmen pada proses	Tanggung jawab yang dipegang adalah menyelesaikan setiap permasalahan pengelolaan sampah secara bersama-sama oleh pihak yang terlibat dalam kolaborasi.	Tanggung jawab di awal kolaborasi cukup tinggi, namun seiring waktu beberapa pihak mulai jarang terlibat dalam kegiatan.	Upaya dilakukan agar volume sampah dapat berkurang, namun masih terdapat kendala dalam pengolahan kembali sampah karena keterbatasan alat.	TPS 3R Naroso sudah berjalan dengan baik, dan masyarakat mulai tidak membuang sampah sembarangan, meskipun masih ada sebagian warga yang belum tertib.	Pada tahun 2021, TPS 3R di Huntap belum berjalan maksimal. Namun, sejak adanya kerja sama antara Kelurahan Tondo dan DLH, TPS 3R mulai berfungsi dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kendala.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan data dokumen dapat di simpulkan bahwa Komitmen dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo pada dasarnya didasari oleh prinsip kebersamaan atau “sistem keroyokan,” di mana setiap permasalahan diselesaikan secara bersama-sama sebagai bentuk tanggung jawab. Namun, komitmen ini mengalami penurunan seiring berjalannya waktu, terutama karena keterbatasan dana operasional yang dibutuhkan tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia. Di sisi lain, meskipun sudah ada upaya pengurangan volume sampah melalui proses pengolahan kembali, pelaksanaannya masih terkendala oleh minimnya ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah.

5.1.4.4 Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama adalah memiliki tujuan bersama yang jelas antar pemerintah yang berkolaborasi dan mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang ingin dicapai.

Sebagaimana hasil wawancara bersama bapak IM Selaku sekretaris dinas lingkungan hidup kota palu mengenai komitmen dalam pemahaman bersama *collaborative governance* pengelolaan sampah:

“Tentunya tujuan kami bersama adalah untuk menjadi kan kelurahan tondo bebas dari masalah sampah karena penilaian jalur terminal, laut taipa, dan Pelabuhan selalu melalui kelurahan tondo. Adapun pengambilan keputusan selalu melalui musyawarah di kelurahan yang kemudian di teruskan kepada DLH. Musyawarah kadang kala tidak berjalan dengan baik terutama terkait retribusi sampah sehingga harus

mendiskusi kan lebih mendalam untuk mencapai kesepakatan bersama”(wawancara 14 juli 2025).

Berdasarkan hasil analisis bahwa tujuan utama kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo adalah menjadikan wilayah tersebut bebas dari permasalahan sampah, mengingat posisinya yang strategis karena dilalui jalur terminal, laut Taipa, dan pelabuhan. Dalam prosesnya, pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah di tingkat kelurahan sebelum diteruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Namun, musyawarah tidak selalu berjalan mulus, terutama dalam pembahasan mengenai retribusi sampah yang sering menimbulkan perbedaan pendapat sehingga membutuhkan diskusi lebih mendalam untuk mencapai kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen bersama, tantangan dalam mencapai keputusan kolektif masih menjadi dinamika yang harus dikelola dengan baik.

Selanjutnya, hasil wawancara bersama bapak VE selaku Kasi Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum menyatakan bahwa:

“ya kalau tujuan bersama itu ada, kita semua mau Tondo ini bersih tidak ada lagi sampah numpuk di pinggir jalan serta lingkungan yang enak dipandang. Kalau di Tondo ini pengambilan keputusan soal pengelolaan sampah itu biasanya lewat musyawarah. Kita kumpul dikantor kelurahan, panggil RT/RW, perwakilan warga, sama pihak-pihak yang terlibat. Kita dengar semua masukan baru tentukan langkah yang mau diambil. ya perbedaan pendapat itu sering terjadi kalau kita rapat bahas pengelolaan sampah. Namanya juga banyak pihak yang terlibat, pasti ada saja yang beda pandangan. Tapi saya

pikir itu wajar yang penting ujungnya kita bisa ambil keputusan yang disepakati bersama”(wawancara 18 juli 2025).

Dari hasil analisis bahwa tujuan bersama dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo adalah menciptakan lingkungan yang bersih, bebas dari tumpukan sampah di pinggir jalan, serta nyaman dipandang. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah di kantor kelurahan dengan melibatkan RT/RW, perwakilan warga, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dalam forum tersebut, semua masukan didengarkan sebelum menentukan langkah yang akan diambil. Perbedaan pendapat sering muncul karena banyak pihak yang terlibat, namun hal itu dianggap wajar selama pada akhirnya keputusan dapat diambil secara kolektif dan disepakati bersama. Hal ini mencerminkan adanya praktik demokratis dalam pengelolaan sampah yang menekankan partisipasi dan kesepakatan bersama.

Selanjutnya, hasil wawancara bersama ibu A selaku ketua TPS 3R Naroso menyatakan bahwa:

“pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi memang memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai, yaitu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, serta mengurangi volume sampah yang menumpuk di wilayah tondo. Dan juga menyadarkan warga bahwa sampah masih memiliki nilai”(wawancara 08 agustus 2025).

Berdasarkan hasil analisis bahwa mencerminkan adanya pemahaman bersama antar pihak yang berkolaborasi dalam pengelolaan sampah di Tondo, di mana tujuan utama yang ingin dicapai bukan hanya menciptakan lingkungan yang bersih dan

sehat, tetapi juga mengurangi volume sampah yang menumpuk serta membangun kesadaran masyarakat mengenai nilai ekonomis dari sampah. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak sekedar berorientasi pada penyelesaian masalah lingkungan secara teknis, melainkan juga memiliki dimensi pemberdayaan sosial dengan mendorong partisipasi warga melalui pemanfaatan kembali sampah.

Kemudian, hasil wawancara bersama bapak B selaku RT 01 huntap tondo mengatakan bahwa:

“Pastinya itu tujuan nya untuk membuat kelurahan tondo bersih”(wawancara 13 agustus 2025).

Selanjutnya, hasil wawancara bersama bapak H selaku RT 03 huntap tondo mengatakan bahwa:

“Tujuan nya sudah pasti ingin membuat kelurahan tondo menjadi kurang dari sampah”(wawancara 13 agustus 2025).

Dapat dianalisis bahwa tujuan utama dari kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan terbebas dari tumpukan sampah. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesamaan visi dari pihak-pihak yang terlibat, yaitu menekan permasalahan sampah agar tidak lagi menjadi persoalan yang mengganggu kenyamanan warga. Tujuan ini juga mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup yang lebih sehat dan tertib dalam mengelola sampah.

Tabel 5.7 Persepsi Informan Tentang Pemahaman Bersama

indikator	Sekretaris DLH	Pegawai Kelurahan	Ketua TPS 3R	RT 01	RT 03
<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif) aspek pemahaman bersama	Tujuan bersama adalah menjadikan Kelurahan Tondo bebas dari masalah sampah.	Tujuan bersama adalah menjadikan tondo bersih, tanpa tumpukan sampah di pinggir jalan, serta menciptakan lingkungan yang nyaman dipandang.	Pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi memiliki tujuan bersama, yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, mengurangi volume sampah di Tondo, serta menyadarkan masyarakat bahwa sampah masih memiliki nilai.	Tujuan utama adalah menjadikan Kelurahan Tondo bersih dari sampah.	Tujuan nya sudah pasti ingin membuat kelurahan tondo menjadi kurang dari sampah.

Berdasarkan hasil obeservasi, wawancara, dan data dokumen dapat disimpulkan bahwa tujuan utama kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo adalah menciptakan lingkungan yang bersih, bebas dari tumpukan sampah, serta nyaman dipandang.

5.1.4.5 Hasil Akhir

Hasil antara merupakan hasil sementara yang diperoleh atau dicapai dari proses kolaborasi, hasil sementara yang diperoleh dapat menjadi pendorong dalam membangun kepercayaan untuk terus berkolaborasi. Hasil antara ini tidak terlepas dari manfaat apa yang didapatkan oleh komunitas dan organisasi.

Sebagaimana hasil wawancara bersama bapak IM Selaku sekretaris dinas lingkungan hidup kota palu mengenai komitmen dalam hasil antara *collaborative governance* pengelolaan sampah:

”Hasil yang di peroleh dalam kolaborasi ini di tandai dengan berjalan nya TPS 3R naroso di kelurahan tondo untuk mendaur ulang sampah. Kami juga melakukan evaluasi terkait kolaborasi pengelolaan sampah bahkan yang terbaru kemarin melalui lomba kelurahan mantap yang kemudian di jadikan bahan evaluasi untuk kelurahan. Adapun hambatan yang sering di temui adalah sering terjadi nya miskomunikasi serta keterbatasan sumber daya yang di miliki yang mengakibatkan kurang maksimal nya hasil dalam kolaborasi pengelolaan kelurahan tondo”(wawancara 14 juli 2025)

Dari hasil analisis bahwa kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo telah memberikan hasil positif, salah satunya ditandai dengan beroperasinya TPS 3R

Naroso yang berfungsi untuk mendaur ulang sampah. Selain itu, evaluasi juga rutin dilakukan, bahkan melalui ajang seperti Lomba Kelurahan Mantap yang dimanfaatkan sebagai bahan penilaian dan perbaikan ke depan. Namun demikian, kolaborasi ini masih menghadapi hambatan berupa sering terjadinya miskomunikasi antar pihak serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Kondisi tersebut menyebabkan hasil kolaborasi belum maksimal, meskipun secara umum sudah menunjukkan perkembangan yang cukup berarti dalam upaya pengelolaan sampah di kelurahan.

Selanjutnya, hasil wawancara bersama bapak VE selaku Kasi Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum menyatakan bahwa:

“Hasil dari kolaborasi ini dapat di lihat dari lingkungan tondo sekarang agak lebih bersih dibanding dulu, sampah yang numpuk di pinggir jalan sudah berkurang apalagi di titik-titik yang dulu parah. TPS 3R juga sudah mulai jalan walaupun belum maksimal tapi lumayan membantu. Adapun kami melakukan evaluasi itu bersamaan dengan adipura yang di lakukan di pertengahan tahun. hambatan itu pasti ada, kadang masalahnya di komunikasi atau informasi dari satu pihak yang berkolaborasi tidak sampai ke pihak lain, jadi pekerjaan terlambat”(wawancara 18 juli 2025)

Berdasarkan hasil analisis bahwa kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo telah memberikan dampak positif yang terlihat dari kondisi lingkungan yang kini lebih bersih dibandingkan sebelumnya, dengan berkurangnya tumpukan sampah di pinggir jalan, khususnya di titik-titik yang sebelumnya menjadi permasalahan utama. Operasional TPS 3R juga mulai berjalan meskipun belum maksimal, namun

sudah cukup membantu dalam pengelolaan sampah. Evaluasi kolaborasi dilakukan secara berkala, salah satunya bertepatan dengan kegiatan Adipura di pertengahan tahun. Meski demikian, hambatan masih sering muncul, terutama terkait komunikasi atau informasi yang tidak tersampaikan dengan baik antar pihak, sehingga menimbulkan keterlambatan dalam pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hasilnya sudah terlihat, perbaikan pada aspek koordinasi tetap diperlukan agar kolaborasi lebih optimal.

Selanjutnya, hasil wawancara bersama ibu A selaku ketua TPS 3R Naroso menyatakan bahwa:

“TPS 3R di sini pada tahun 2021 saya akui belum maksimal dan masih banyak kekurangan seperti alat pengelolaan sampah, dan sekarang sejak DLH berkolaborasi bersama Kelurahan Tondo dampah nya sekarang bisa dilihat TPS3R sekarang mulai berjalan maksimal dan juga masyarakat mulai sadar sampah bisa menghasilkan terkait evaluasi Evaluasi bersama itu di lakukan setiap 3 bulan sekali untuk mengevaluasi kembali kinerja terkait pengelolaan sampah, Adapun hambatan itu sendiri itu dari masyarakat kurang paham nya terkait pemilahan sampah. ”(wawancara 08 agustus 2025)

Dari hasil analisis bahwa evaluasi kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo dilakukan secara rutin setiap tiga bulan sekali untuk menilai kembali kinerja dan efektivitas program yang berjalan. Evaluasi ini menjadi wadah penting untuk memperbaiki kekurangan dan menyusun langkah tindak lanjut. Namun, hambatan yang masih dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemilahan sampah, sehingga proses pengelolaan belum berjalan optimal. Kondisi ini

menunjukkan bahwa selain evaluasi berkala, diperlukan juga peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar kesadaran serta partisipasi mereka dalam pemilahan sampah dapat meningkat.

Kemudian, hasil wawancara bersama bapak B selaku RT 01 huntap tondo mengatakan bahwa:

“Sangat terlihat hasil nya dari kolaborasi ini karena kelurahan tondo sekarang mulai kurang dari sampah yang di buang sembarangan, untuk evaluasi saya sebagai RT belum pernah di libatkan dalam evaluasi”(wawancara 13 agustus 2025)

Selanjutnya, hasil wawancara bersama bapak H selaku RT 03 huntap tondo mengatakan bahwa:

“Walaupun ada beberapa aspek yang belum maksimal tapi bisa di lihat kelurahan tondo sekarang mulai bersih sampah tidak berserakan dimana-mana,saya tidak pernah di libatkan dalam evaluasi”(wawancara 13 agustus 2025)

Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo telah menunjukkan hasil yang nyata, terlihat dari berkurangnya sampah yang dibuang sembarangan dan lingkungan yang mulai lebih bersih. Hal ini menandakan adanya keberhasilan dalam implementasi program, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang belum maksimal. Namun, terdapat catatan penting terkait proses evaluasi, di mana informan yang berperan sebagai RT menyampaikan belum pernah dilibatkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun hasil

kolaborasi cukup positif, masih ada kelemahan dalam hal partisipasi dan keterlibatan pihak di tingkat masyarakat.

Tabel 5.8 Persepsi Informan Tentang Hasil Akhir

indikator	Sekretaris DLH	Pegawai Kelurahan	Ketua TPS 3R	RT 01	RT 03
<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif) aspek hasil akhir	Kolaborasi ini menghasilkan berjalannya TPS 3R Naroso di Kelurahan Tondo untuk mendaur ulang sampah. Evaluasi juga rutin dilakukan, salah satunya melalui Lomba Kelurahan Mantap yang dijadikan bahan perbaikan.	Hasil kolaborasi terlihat dari kondisi lingkungan Tondo yang kini lebih bersih dibanding sebelumnya. TPS 3R juga sudah mulai berjalan meskipun belum maksimal, tetapi cukup membantu. Evaluasi dilakukan bersamaan dengan Adipura di pertengahan tahun.	Pada tahun 2021, TPS 3R di Tondo belum berjalan maksimal karena masih banyak kekurangan, terutama dalam hal alat pengelolaan sampah. Namun, sejak adanya kolaborasi antara DLH dan Kelurahan Tondo, TPS 3R mulai berfungsi lebih baik. Evaluasi bersama dilakukan setiap tiga bulan sekali.	Hasil kolaborasi terlihat jelas karena Kelurahan Tondo kini lebih bersih dan sampah yang dibuang sembarangan mulai berkurang. Namun, sebagai RT, saya belum pernah dilibatkan dalam kegiatan evaluasi.	Meskipun masih ada beberapa aspek yang belum maksimal, Kelurahan Tondo kini terlihat lebih bersih dan sampah tidak lagi berserakan. Namun, saya belum pernah dilibatkan dalam evaluasi.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan data dokumen kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo telah memberikan hasil positif yang ditandai dengan beroperasinya TPS 3R Naroso sebagai pusat daur ulang, serta kondisi lingkungan yang kini lebih bersih dengan berkurangnya tumpukan sampah di pinggir jalan. Meski demikian, kolaborasi ini masih menghadapi hambatan seperti evaluasi hasil kolaborasi yang belum rutin dilaksanakan dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah. Hambatan-hambatan tersebut membuat proses pengelolaan belum berjalan optimal meskipun arah perbaikan sudah terlihat.

5.2 Pembahasan

Pada pembahasan ini peneliti akan mendeskripsikan tentang *Collaborative Governance* pengelolaan sampah di Kleurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu menggunakan teor Ansell and Gash dengan 4 indikator yaitu *starting condition* (kondisi awal), *institutional design* (desain kelembagaan), *facilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif), *collaborative process* (proses kolaborasi).

5.2.1 *starting condition* (kondisi awal)

Berdasarkan hasil wawancara dan fakta di lapangan yang peneliti temukan mengenai indikator *starting condition* (kondisi awal) dapat disimpulkan bahwa latar belakang terbentuknya kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo berangkat

dari kondisi awal yang penuh permasalahan. Tingginya kepadatan penduduk menyebabkan volume sampah terus meningkat, sementara sarana pengangkutan sangat terbatas hanya dengan dua armada. Sebelum adanya kolaborasi, pengelolaan sampah lebih banyak dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, namun dengan cara yang tidak terorganisir, yakni menumpuk sampah di satu titik atau membuangnya sembarangan. Hal ini menimbulkan persoalan baru berupa penumpukan, pencemaran, serta lingkungan yang kotor dan tidak sehat. Kondisi tersebut semakin berat karena TPS 3R pada awalnya belum berfungsi optimal dan kesadaran masyarakat terhadap nilai ekonomis sampah masih rendah, sehingga sampah hanya dipandang sebagai limbah yang harus dibuang. Kehadiran TPS 3R kemudian menjadi solusi penting, karena selain menyediakan sarana pengelolaan dan pemilahan, juga mendorong perubahan pola pikir masyarakat bahwa sampah dapat dimanfaatkan kembali.

Relevansi temuan ini dapat di kaitkan dengan teori Ansell and Gash *Starting Condition* (Kondisi Awal) yang menekankan pada situasi awal sebelum kolaborasi berlangsung, serta latar belakang terjadi kolaborasi. Dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo, kondisi awal ditandai dengan berbagai keterbatasan dan masalah struktural. Pertama, tingginya kepadatan penduduk berdampak pada meningkatnya volume sampah yang tidak sebanding dengan ketersediaan sarana angkutan yang hanya dua armada. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan sumber daya, salah satu aspek penting dalam indikator kondisi awal menurut Ansell & Gash. Kedua, sebelum ada kolaborasi, masyarakat mengelola sampah secara swadaya namun tidak

terorganisir, cenderung menumpuk sampah di satu titik atau membuangnya sembarangan. Situasi ini menggambarkan adanya kurangnya koordinasi dan kepercayaan antar pihak, sehingga pengelolaan sampah tidak efektif. Ketiga, TPS 3R pada awalnya belum berfungsi optimal, ditambah dengan rendahnya kesadaran masyarakat bahwa sampah memiliki nilai ekonomis. Ini menunjukkan bahwa di awal, masyarakat masih memandang sampah hanya sebagai limbah, bukan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan.

Adapun penelitian terdahulu yang mendukung temuan peneliti yaitu Niluh Eka Puri Setiawandari, Arimurti Kriswibowo (2023). dapat dilihat bahwa tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah, baik di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan maupun di Kelurahan Tondo, sama-sama berangkat dari kondisi awal yang penuh permasalahan. Tingginya volume sampah, keterbatasan sarana pengangkutan, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor pendorong lahirnya kolaborasi daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan teori Ansell dan Gash yang menekankan bahwa kondisi awal (*starting condition*) merupakan salah satu indikator penting dalam membangun *collaborative governance*, karena dari masalah-masalah awal tersebut tumbuh kebutuhan dan insentif untuk bekerja sama.

Berdasarkan kondisi awal pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo yang penuh permasalahan, berbagai solusi kolaboratif diterapkan untuk mengatasi persoalan tersebut. Pengoperasian TPS 3R Naroso perlu dioptimalkan sebagai pusat

pemilahan dan pengolahan sampah, sehingga memungkinkan masyarakat memanfaatkan kembali sampah organik maupun non-organik. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi mengenai nilai ekonomis sampah menjadi strategi penting untuk mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan.

5.2.2 *institutional design* (desain kelembagaan)

Berdasarkan data dan hasil wawancara terkait indikator *institutional design* (desain kelembagaan) pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo pada dasarnya telah memiliki dasar hukum umum, yaitu Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perda Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang kebersihan dan lingkungan. Namun, di tingkat kelurahan belum tersedia aturan teknis yang secara rinci mengatur mekanisme kolaborasi, sehingga praktik di lapangan lebih banyak bergantung pada Surat Keputusan (SK) dan kesepakatan internal antar pihak. Pelaksanaan kolaborasi ini melibatkan tiga pihak utama dengan peran berbeda namun saling melengkapi, yaitu Dinas Lingkungan Hidup sebagai penyedia sarana pendukung, Kelurahan Tondo sebagai pengawas, serta TPS 3R Naroso sebagai pelaksana teknis dalam mengelola dan mendaur ulang sampah. Meskipun hasil kolaborasi ini telah memberikan dampak positif dengan berkurangnya sampah yang berserakan di lingkungan, keberhasilannya masih sangat bergantung pada komitmen, kesadaran, serta inisiatif para pihak yang terlibat.

Relevansi temuan ini dapat dikaitkan dengan teori Ansell and Gash *institutional design* (desain kelembagaan). Desain kelembagaan yang baik menjadi faktor penentu keberhasilan kolaborasi karena dapat meminimalkan konflik, mengatur distribusi peran, dan memperkuat koordinasi antar stakeholder. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo, desain kelembagaan memang telah memiliki dasar hukum umum berupa Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021 dan Perda Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016. Namun, di tingkat kelurahan belum ada aturan teknis yang rinci untuk mengatur mekanisme kolaborasi secara formal. Praktik di lapangan lebih banyak mengandalkan Surat Keputusan (SK) dan kesepakatan internal antar pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme kelembagaan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *institutional design* menurut Ansell & Gash, karena forum formal dan aturan yang jelas untuk partisipasi semua pihak masih terbatas.

Adapun penelitian terdahulu yang mendukung temuan peneliti yaitu Tri Oktavia Ulya, Augustin Rina Herawati, Ari Subowo (2022) *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah dapat berjalan efektif meskipun terdapat keterbatasan dalam aturan formal, sebagaimana terlihat pada kasus Pantai Teluk Penyu, Kabupaten Cilacap, dan Kelurahan Tondo. Meskipun belum ada regulasi formal yang mengatur mekanisme kolaborasi secara rinci, rasa saling ketergantungan antar stakeholder mampu menutupi kekosongan regulasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa faktor

hubungan sosial, kepercayaan, dan kebutuhan bersama dapat menjadi pendorong kolaborasi yang efektif.

Berdasarkan desain kelembagaan pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo. Untuk mengatasi permasalahan diperlukan beberapa langkah strategis. Penyusunan aturan teknis tingkat kelurahan yang secara rinci mengatur mekanisme kolaborasi, termasuk pembagian peran, tanggung jawab, dan prosedur pengambilan keputusan, sehingga praktik kolaborasi tidak lagi hanya bergantung pada SK atau kesepakatan internal.

5.2.3 *facilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif)

Berdasarkan hasil wawancara terkait indicator *facilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif) bahwa dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo, keberadaan mediator memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran komunikasi dan koordinasi antar pihak. Mediator utama dijalankan oleh pihak kelurahan yang berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat, TPS 3R, serta Dinas Lingkungan Hidup. Kelurahan juga menjadi pusat koordinasi dan penyampai informasi terkait program yang dijalankan, sehingga arah kebijakan dapat tersampaikan dengan jelas. Di tingkat lapangan, peran mediator turut diperkuat oleh RT/RW yang menjadi perpanjangan tangan kelurahan, mengingat kedekatan mereka dengan masyarakat sehingga komunikasi dan pelaksanaan program dapat lebih efektif. Selain itu, ketua TPS 3R juga kerap berperan sebagai mediator dalam

menyampaikan keluhan atau aspirasi warga, terutama terkait aspek teknis pengelolaan sampah. Dengan demikian, fungsi mediator tidak hanya terpusat pada satu pihak, melainkan dibagi secara sinergis antara kelurahan, RT/RW, dan TPS 3R. Pola mediasi yang berlapis ini tidak hanya memperkuat partisipasi masyarakat, tetapi juga mempermudah penyelesaian masalah di lapangan. Namun, hal ini menuntut adanya koordinasi yang baik agar tidak terjadi tumpang tindih peran dan setiap program dapat berjalan sesuai kebutuhan serta kondisi lingkungan setempat.

Relevansi temuan ini dapat di kaitkan dengan teori Ansell and Gash *facilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif). Dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo, peran mediator sangat penting dan mencerminkan praktik kepemimpinan fasilitatif menurut Ansell & Gash. Mediator utama dijalankan oleh pihak kelurahan, yang berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat, TPS 3R, dan Dinas Lingkungan Hidup serta sebagai pusat koordinasi program. Di tingkat lapangan, peran ini diperkuat oleh RT/RW untuk menjembatani komunikasi dengan warga, sementara ketua TPS 3R berperan menyampaikan keluhan dan aspirasi terkait aspek teknis.

Penelitian terdahulu yang mendukung temuan peneliti yaitu Lisdanur Ulfaida, Lukman Munawar Fauzi, Toto Kushartono(2024). Di Pasar Antri, Kota Cimahi, dan Kelurahan Tondo, terlihat bahwa keberhasilan *collaborative governance* sangat dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, pembagian peran, dan kepemimpinan fasilitatif.

Di Pasar Antri, meskipun dasar hukum berupa Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 06 Tahun 2019 telah mengatur akuntabilitas pengelolaan sampah, kolaborasi belum berjalan optimal karena kurangnya saling percaya antar stakeholder, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Kurangnya kepercayaan ini berdampak pada program pemerintah yang belum terlaksana dan komunikasi antar pihak yang tidak efektif.

Berdasarkan kepemimpinan fasilitatif pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo. Untuk memperkuat kepemimpinan fasilitatif dan peran mediator dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, menyusun pedoman tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi kelurahan, RT/RW, dan TPS 3R untuk meminimalkan tumpang tindih peran. Kedua, menetapkan jadwal koordinasi rutin yang melibatkan semua pihak terkait guna menyelaraskan program, membahas kendala, dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan.

5.2.4 Dialog Tatap Muka

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan yang peneliti kumpulkan mengenai indikator dialog tatap muka dapat disimpulkan bahwa mekanisme kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo memang telah berjalan dengan cukup baik melalui musyawarah, pertemuan rutin, serta komunikasi intensif antara pihak kelurahan, pengelola TPS 3R, dan masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak dalam rapat dan pengambilan keputusan juga menunjukkan adanya

pola partisipatif yang mendorong kebersamaan dalam mengatasi masalah sampah. Namun demikian, pelaksanaan kolaborasi ini masih belum maksimal karena pertemuan tatap muka umumnya bersifat fungsional hanya ketika ada program tertentu, sehingga keberlanjutan koordinasi belum sepenuhnya terjaga. Selain itu, keterlibatan DLH cenderung terbatas hanya pada isu-isu strategis, sementara peran RT atau masyarakat lebih luas belum dilibatkan secara merata dalam proses evaluasi. Kondisi ini membuat pengelolaan sampah memang terlihat lebih terarah dibanding sebelumnya, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar hasil yang dicapai benar-benar optimal dan berkelanjutan.

Relevansi temuan peneliti dapat di kaitkan dengan teori Ansell and Gash aspek Dialog Tatap Muka. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo, mekanisme dialog tatap muka terlihat melalui musyawarah, pertemuan rutin, dan komunikasi intensif antara kelurahan, TPS 3R, dan masyarakat. Ini mencerminkan partisipatif yang sesuai dengan teori Ansell & Gash, karena setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Namun, terdapat beberapa keterbatasan yang relevan dengan teori tersebut. Pertemuan tatap muka cenderung bersifat fungsional dan terbatas hanya saat ada program tertentu, sehingga kontinuitas komunikasi tidak sepenuhnya terjaga. Selain itu, DLH hanya terlibat pada isu strategis, sementara partisipasi RT dan masyarakat dalam evaluasi belum merata.

Penelitian Terdahulu yang mendukung temuan peneliti yaitu Sugiana Desi Safitri, Afifuddin, Agus Zainal Abidin (2021). Dari temuan di Bank Sampah Sejahtera dan TPS 3R Naroso, terlihat bahwa dialog tatap muka menjadi elemen penting dalam mekanisme kolaborasi pengelolaan sampah. Di Bank Sampah Sejahtera, pertemuan dilakukan melalui musyawarah dengan kader lingkungan untuk membahas kendala, seperti pengelompokan jenis sampah, komunikasi, dan kesibukan pengurus. Keterlibatan DLH sebagai pembina dan pemerintah desa sebagai pembina tingkat desa menunjukkan adanya peran fasilitatif, meskipun kolaborasi dengan pengepul baru berjalan sekitar dua tahun terakhir.

Berdasarkan Dialog Tatap Muka pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo. Untuk meningkatkan efektivitas mekanisme dialog tatap muka dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo, beberapa langkah perlu diterapkan. Pertama, menetapkan jadwal pertemuan rutin secara berkala agar koordinasi tidak hanya terjadi saat ada program tertentu, sehingga kontinuitas komunikasi dan kolaborasi tetap terjaga. Kedua, meningkatkan partisipasi semua pihak, termasuk DLH, RT, RW, dan masyarakat, agar masukan dari berbagai stakeholder dapat terakomodasi dalam pengambilan keputusan dan evaluasi program.

5.2.5 Membangun Kepercayaan

Berdasarkan data dan hasil wawancara terkait indikator membangun kepercayaan bahwa kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo dibangun

atas dasar rasa saling percaya antar pihak dengan tujuan mewujudkan lingkungan bersih dan sehat. Kepercayaan ini menjadi modal penting yang memungkinkan koordinasi dan pembagian peran berjalan lebih lancar, meski dalam praktiknya belum maksimal karena masih ditemui hambatan berupa janji yang tidak ditepati, keterlambatan pelaksanaan tugas, serta kecenderungan sebagian pihak berjalan sendiri. Selain itu, kendala struktural seperti luas wilayah, kepadatan penduduk, dan keterbatasan sarana transportasi juga turut memengaruhi efektivitas kolaborasi. Oleh karena itu, transparansi, komunikasi terbuka, serta konsistensi dalam pelaksanaan menjadi kunci untuk menjaga dan memperkuat kepercayaan agar kolaborasi dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Relevansi temuan peneliti dapat di kaitkan dengan teori Ansell and Gash. Dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo, membangun kepercayaan menjadi modal sosial yang krusial untuk keberhasilan proses kolaboratif, sesuai dengan indikator membangun kepercayaan menurut Ansell & Gash. Kepercayaan memungkinkan koordinasi lebih lancar, pembagian peran berjalan efektif, serta meminimalkan potensi konflik antar pihak. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo, kolaborasi dibangun atas dasar rasa saling percaya antara kelurahan, TPS 3R, DLH, dan masyarakat, dengan tujuan bersama mewujudkan lingkungan bersih dan sehat. Kepercayaan ini tercermin dari kesediaan pihak-pihak untuk berbagi peran dan berkoordinasi.

Penelitian terdahulu yang mendukung temuan peneliti yaitu Tri Oktavia Ulya, Augustin Rina Herawati, Ari Subowo (2022). Dalam pengelolaan sampah baik di Pantai Teluk Penyu maupun di Kelurahan Tondo, membangun kepercayaan menjadi fondasi penting bagi keberhasilan kolaborasi. Di Pantai Teluk Penyu, kepercayaan dibangun melalui kegiatan informal yang melibatkan berbagai pihak, dengan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga lingkungan pantai. Bentuk kolaborasi ini menciptakan rasa saling percaya sehingga setiap pihak dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan komitmen.

Berdasarkan Membangun Kepercayaan pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo. Untuk menjaga dan memperkuat kepercayaan antar pihak dalam kolaborasi pengelolaan sampah, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, meningkatkan transparansi melalui penyampaian laporan rutin mengenai progres pengelolaan sampah agar setiap pihak mengetahui tanggung jawab dan capaian bersama. Kedua, memperkuat komunikasi terbuka dengan mengadakan forum rutin serta memanfaatkan media digital untuk penyampaian informasi secara cepat dan merata.

5.2.6 Komitmen Pada Proses

Berdasarkan hasil wawancara dan fakta di lapangan yang peneliti temukan mengenai indikator komitmen pada proses dapat dilihat bahwa kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo telah menunjukkan adanya komitmen bersama dengan prinsip kebersamaan atau “sistem keroyokan” yang mencerminkan

tanggung jawab kolektif. Namun, komitmen tersebut mengalami penurunan seiring waktu, dipengaruhi oleh keterbatasan dana serta berkurangnya partisipasi sebagian pihak. Upaya pengurangan volume sampah melalui TPS 3R Naroso sudah membawa dampak positif, terutama pada perubahan perilaku masyarakat yang lebih tertib dalam membuang sampah, meskipun masih ada warga yang belum disiplin. Kendati demikian, keterbatasan sarana dan alat pengolahan membuat pengelolaan belum berjalan optimal. Dengan demikian, kolaborasi di Tondo sudah berada di jalur yang benar, tetapi dukungan sumber daya, konsistensi partisipasi, serta evaluasi berkelanjutan masih sangat dibutuhkan agar pengelolaan sampah dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Relevansi temuan peneliti dapat di kaitkan dengan teori Ansell and Gash. menjadi salah satu fondasi penting dalam *collaborative governance*, karena kepercayaan memungkinkan koordinasi yang lancar, pembagian peran yang efektif, serta komitmen stakeholder terhadap tujuan bersama. Kepercayaan yang kuat mendorong partisipasi aktif, konsistensi pelaksanaan tugas, dan kesediaan pihak-pihak untuk saling mengandalkan dalam proses kolaboratif. Dalam konteks kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo, adanya prinsip kebersamaan atau “sistem keroyokan” menunjukkan bahwa para pihak pada awalnya memiliki kepercayaan dan komitmen yang tinggi untuk menjalankan peran masing-masing.

Penelitian terdahulu yang mendukung temuan peneliti yaitu Tri Oktavia Ulya, Augustin Rina Herawati, Ari Subowo (2022). Pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu maupun di Kelurahan Tondo, menunjukkan bahwa komitmen terhadap proses kolaborasi menjadi faktor kunci keberhasilan pengelolaan sampah, meskipun terdapat perbedaan konteks dan tantangan. Di Pantai Teluk Penyu, meski belum ada aturan formal, komitmen tetap tinggi karena setiap aktor memahami pentingnya peran dan tanggung jawab masing-masing, serta menyadari adanya ketergantungan antar pihak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran bersama dan pemahaman akan peran masing-masing dapat memunculkan komitmen yang kuat, bahkan tanpa dukungan regulasi formal.

Berdasarkan Komitmen Pada Proses pengelolaan sampah di Kleurahan Tondo. Partisipasi pihak terkait perlu diperkuat dengan jadwal kontribusi yang jelas dan insentif bagi yang aktif. Evaluasi dan monitoring rutin, misalnya setiap tiga bulan, harus melibatkan semua pihak agar transparansi dan akuntabilitas terjaga. Selain itu, sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang disiplin membuang sampah serta manfaat TPS 3R penting untuk membentuk perilaku tertib. Koordinasi antar stakeholder juga harus diperjelas dengan penunjukan mediator yang konsisten agar komunikasi efektif dan peran setiap pihak tidak tumpang tindih, sehingga komitmen kolektif dapat terjaga dan pengelolaan sampah menjadi lebih optimal serta berkelanjutan.

5.2.7 Pemahaman Bersama

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan yang peneliti kumpulkan mengenai indikator pemahaman bersama bahwa tujuan utama kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo adalah menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari permasalahan sampah, sejalan dengan posisi strategis kelurahan yang dilalui jalur transportasi penting. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah di tingkat kelurahan dengan melibatkan perangkat RT/RW, warga, serta Dinas Lingkungan Hidup, yang mencerminkan adanya partisipasi dan keterbukaan. Meski begitu, dinamika berupa perbedaan pendapat khususnya terkait retribusi dan teknis pelaksanaan seringkali muncul sehingga membutuhkan diskusi lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen dan visi bersama, efektivitas kolaborasi masih dipengaruhi oleh kemampuan mengelola perbedaan serta menjaga partisipasi masyarakat agar keputusan yang diambil benar-benar dapat diterima dan dijalankan bersama.

Relevansi temuan peneliti dapat di kaitkan dengan teori Ansell and Gash. menekankan pentingnya adanya kesepahaman tentang tujuan, masalah, dan kepentingan yang ingin dicapai dalam proses kolaborasi. Analisis pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo menunjukkan relevansi yang kuat dengan indikator ini, karena tujuan kolaborasi menciptakan lingkungan bersih, sehat, dan bebas dari

sampah sudah dipahami bersama oleh semua pihak, termasuk kelurahan, RT/RW, masyarakat, dan Dinas Lingkungan Hidup. Proses pengambilan keputusan melalui musyawarah menunjukkan adanya partisipasi dan keterbukaan yang mendukung tercapainya pemahaman bersama.

Penelitian terdahulu yang mendukung temuan peneliti yaitu Idris, Dian Herdiana, Iqbal Miftakhul Mujtahid (2022). Berdasarkan temuan di Kecamatan Pulau Tiga Barat, pemahaman bersama dibangun melalui sosialisasi Perda Nomor 03 Tahun 2015 tentang persampahan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada pihak kecamatan, sehingga masyarakat dan pemerintah memiliki persepsi yang selaras mengenai tujuan dan mekanisme pengelolaan sampah. Hal ini sejalan dengan indikator pemahaman bersama menurut Ansell and Gash (2008), yang menekankan pentingnya misi dan tujuan yang jelas sebagai landasan keberlangsungan kolaborasi. Sementara itu. Kelurahan Tondo pemahaman bersama tercermin dari tujuan kolaborasi pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat, dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah yang melibatkan RT/RW, warga, dan Dinas Lingkungan Hidup. Meskipun terdapat dinamika berupa perbedaan pendapat terkait retribusi dan teknis pelaksanaan, proses musyawarah dan partisipasi terbuka menunjukkan adanya upaya memperkuat kesepahaman bersama.

Berdasarkan Pemahaman Bersama pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo. Solusi untuk memperkuat pemahaman bersama dalam kolaborasi pengelolaan sampah

di Kelurahan Tondo antara lain meliputi sosialisasi dan edukasi rutin kepada warga, RT/RW, serta pengurus TPS 3R mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme pengelolaan sampah. Selain itu, penguatan musyawarah berkala perlu dilakukan untuk membahas program rutin maupun isu strategis, termasuk menangani perbedaan pendapat.

5.2.8 Hasil Akhir

Berdasarkan hasil wawancara dan fakta di lapangan yang peneliti temukan mengenai indikator hasil antara dapat di lihat Kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo telah memberikan hasil positif, terlihat dari lingkungan yang lebih bersih, berkurangnya sampah yang dibuang sembarangan, serta beroperasinya TPS 3R Naroso yang mulai membantu proses daur ulang. Namun, hasil kolaborasi ini masih belum maksimal karena terdapat beberapa hambatan seperti evaluasi terkait hasil kolaborasi yang belum rutin di laksanakan dan rendahnya pemahaman warga mengenai pemilahan sampah membuat pengolahan sampah belum berjalan optimal. Dengan demikian, meskipun kolaborasi ini telah menunjukkan capaian yang signifikan, penguatan koordinasi, peningkatan fasilitas, serta sosialisasi yang lebih

intensif kepada masyarakat masih sangat diperlukan agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Relevansi temuan peneliti dengan teori Ansell and gash. Hasil kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo menunjukkan capaian positif sesuai indikator hasil antara menurut Ansell and Gash. Terlihat dari lingkungan yang lebih bersih, berkurangnya sampah sembarangan, dan beroperasinya TPS 3R Naroso. Evaluasi rutin melalui forum tiga bulanan, Lomba Kelurahan Mantap, dan persiapan Adipura menjadi sarana perbaikan berkelanjutan, sesuai prinsip teori yang menekankan pembelajaran kolektif.

Penelitian terdahulu yang mendukung temuan peneliti yaitu Tri Oktavia Ulya, Augustin Rina Herawati, Ari Subowo (2022). Hasil antara kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo dan Pantai Teluk Penyu menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* dapat menghasilkan capaian positif meskipun belum sepenuhnya maksimal. Di Pantai Teluk Penyu, keberhasilan terlihat dari perolehan Adipura Kabupaten Cilacap, menandakan pengelolaan lingkungan dan sampah mendapat pengakuan formal, meski masalah sampah di pantai masih memerlukan solusi lebih lanjut. Sementara itu, di Kelurahan Tondo, hasil antara tercermin dari lingkungan yang lebih bersih, berkurangnya sampah yang dibuang sembarangan, serta beroperasinya TPS 3R Naroso yang mulai membantu proses daur ulang.

Evaluasi rutin, baik melalui forum tiga bulanan, Lomba Kelurahan Mantap, maupun persiapan Adipura, menjadi sarana perbaikan berkelanjutan.

Berdasarkan Hasil Antara pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo. Solusi untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo meliputi penguatan koordinasi antar pihak melalui rapat rutin yang melibatkan kelurahan, TPS 3R, RT/RW, masyarakat, dan DLH. peningkatan sarana dan fasilitas TPS 3R seperti alat pemilahan, komposter, dan armada pengangkut. sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai pemilahan sampah dan manfaat daur ulang, peningkatan partisipasi warga dalam forum evaluasi rutin untuk memperkuat tanggung jawab kolektif serta pemanfaatan teknologi komunikasi, seperti grup digital.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo lahir dari kondisi awal yang cukup kompleks, yakni meningkatnya volume sampah akibat kepadatan penduduk, keterbatasan armada pengangkut, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Dari sisi kelembagaan, kolaborasi ini memiliki legitimasi regulatif melalui Perda tingkat provinsi dan kota, namun masih lemah pada aspek teknis karena belum tersedia SOP yang rinci. Hal ini menjadikan pelaksanaan di lapangan sangat bergantung pada komunikasi, komitmen, dan inisiatif pihak-pihak yang terlibat. kepemimpinan fasilitatif, Mediator utama dijalankan oleh pihak kelurahan tondo yang berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat, TPS 3R, serta Dinas Lingkungan Hidup. Kelurahan juga menjadi pusat koordinasi dan penyampaian informasi terkait program yang dijalankan. Secara hasil akhir, kolaborasi ini telah membawa perubahan positif, seperti berkurangnya sampah di titik rawan, beroperasinya TPS 3R Naroso. Namun, proses kolaborasi ini masih belum maksimal karena terdapat beberapa hambatan seperti evaluasi terkait kolaborasi yang belum rutin di laksanakan dan rendahnya pemahaman warga mengenai pemilahan sampah membuat pengolahan sampah belum berjalan optimal.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, berikut tiga saran yang dapat diberikan.

1. Evaluasi yang lebih rutin Pelibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk RT/RW. Hal ini bertujuan agar hasil evaluasi lebih komprehensif, mencerminkan kondisi di lapangan, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama.
2. Menyusun SOP (Standard Operating Procedure) menjadi acuan tertulis yang menjelaskan langkah-langkah teknis kolaborasi, sehingga semua pihak yang terlibat memahami prosedur yang harus dilakukan dan juga untuk alur komunikasi, dan tindak lanjut masalah agar setiap informasi tidak tertunda dan penanganan masalah lebih cepat.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan fasilitas pengelolaan sampah untuk memperlancar proses pengumpulan, pengangkutan, hingga pengelolaan sampah dapat maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

- Abdul, S. (2015). *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia Lorens Bagus.
- Astuti, S. R. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- B, C. (2007). *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: EGC.
- Dimock & Demock. (1998). *Public Administration*. Alih Bahasa Jakarta : Husni Thamrin Pane.
- Dwiyanto, A. (2011). *Manajamen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gie, L. T. (1993). *Administrasi Negara*. Jakarta: PT Prestasi Pustakarya.
- Gladys, D. O., Marshal, E. (2020). *Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Goodnow, F. J., & White Goondow, L. D. (1900). *Politic And Administration*. New York: Macmillan.
- Henry, N. (1988). *Aministrasi Negara Dan Masalah-masalah Kenegaraan*. Jakarta: Rajawali.
- Maksudi, I. B. (2017). *Dasar-dasar Administrasi Publik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance*. Yogyakarta: Bildung
- Rahman, k. s. (2017). *Ilmu Administrasi*. Makassar: CV Sah Media.
- Siagian, S. P. (2004). *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Binarupa Aksara.

- Sudarmo. (2015). *Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance*. Sebelas Maret University Press.
- Sugiyono . (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2015). *Metode Peneletian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwerda, Bambang. (2012). *Bank Sampah*. Yogyakarta: Pustaka Rihama
- Tahir, A. (2020). *Administrasi Publik (Good Governance Menuju Sound Government)*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (2014). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.

B.Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang *Pengelolaan Sampah*
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang *Pengelolaan Sampah*

C.Sumber Lainnya

- Setiawandari, N. E., & Krisbowo, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 149-150.
- Safitri, S. D., Afifuddin, & Abidin, A. Z. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Sejahtera Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep). *Jurnal Respon Publik*, 52-57.
- Puspita, T. A., & Wahyudi, K. E. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jombang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 284-286.
- Idris, Herdiana, D., & Mujtahid, I. M. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 9811-9812.
- Ulfaida, L., Fauzi, L. M., & Kushartono, T. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Antri Kota Cimahi. *Jurnal Praxis Idealis*, 1-11

L

A

M

P

I

R

A

N

Daftar Informan

1. Nama : Ibnu Mundzir, SP ,M.Eng
Umur : 44 Tahun
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
2. Nama : Moh. Vikri A. S Erwin Lamporo, S.STP
Umur : 36 Tahun
Jabatan : Kasi Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kelurahan Tondo
3. Nama : Ahzinar
Umur : 42 Tahun
Jabatan : Ketua TPS 3R Naroso
4. Nama : Baharuddin
Umur : 41 Tahun
Jabatan : RT 01 Huntap Tondo
5. Nama : Helmi
Umur : 42 Tahun
Jabatan : RT 03 Huntap Tondo

Pedoman Wawancara

Identitas

Nama : Fitaqwa Prasni Ramadhan
Stambuk : B10121097
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Penelitian : *Collaborative Governance Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu*
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Rahmawati Halim, S.Sos., M.Si.
2. Dra.Nurhayati Hamid, M.Si.

Petunjuk Umum

1. Sebelum melakukan wawancara, ciptakan suasana yang tidak terlalu formal, akrab dan santai
2. Dalam melakukan wawancara, jangan terkesan menggurui dan mencari-cari kesalahan
3. Siapkan alat dokumentasi wawancara berupa alat tulis, perekam dan kamera
4. Awali dengan pertanyaan pokok yang sudah dipersiapkan, kemudian kembangkan pertanyaan selanjutnya secara mendalam agar memperoleh data/informasi yang lebih detail
5. Akhiri wawancara dengan ucapan terimakasih atas segala bantuannya dalam memberikan informasi.

Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Informan Pegawai Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dan Pegawai Kelurahan Tondo

1. starting condition (kondisi awal)

Apa latar belakang muncul nya kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan sampah?

Bagaimana kondisi awal sebelum ada nya kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan sampah?

2.institutional design (desain kelembagaan)

Apakah ada aturan atau prosedur formal yang mengatur kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan sampah?

3. facilitative leadership (kepemimpinan fasilitatif)

Siapa yang berperan sebagai mediator kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan sampah?

4.collaborative process (proses kolaboratif)

Aspek dialog tatap muka

Seberapa sering proses komunikasi/dialog tatap tatap muka di lakukan antar pihak yang berkolaborasi dalam membahas pengelolaan sampah?

Aspek membangun kepercayaan

Apakah antar pihak yang berkolaborasi saling memiliki rasa saling percaya dalam pengelolaan sampah?

Aspek komitmen pada proses

Bagaimana tanggung jawab antar pihak yang berkolaborasi dalam menjalankan pengelolaan sampah?

Aspek pemahaman bersama

Apakah dari antar pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai dalam pengelolaan sampah?

Bagaimana pengambilan keputusan dalam pengelolaan sampah dilakukan apakah melalui musyawarah atau tidak?

Apakah sering terjadi perbedaan pendapat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan sampah?

Aspek hasil akhir

Apa hasil yang diperoleh dari kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan sampah?

Apakah ada dilakukan evaluasi antar pihak yang berkolaborasi dari hasil yang diperoleh dalam pengelolaan sampah?

Apakah terdapat hambatan dalam proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah?

B. Informan Ketua TPS 3R Naroso

1. Strating condition (kondisi awal)

Bagaimana kondisi awal sebelum ada nya TPS 3R dalam pengelolaan sampah?

2. *institutional design* (desain kelembagaan)

Apakah ada aturan atau prosedur formal yang mengatur kolaborasi dalam pengelolaan sampah?

3. *facilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif)

Siapa yang berperan sebagai mediator dalam pengelolaan sampah di TPS 3R?

4. *collaborative process* (proses kolaboratif)

Aspek dialog tatap muka

Seberapa sering proses komunikasi/dialog tatap tatap muka di lakukan antar pihak yang berkolaborasi dalam membahas pengelolaan sampah?

Aspek membangun kepercayaan

Apakah dari pihak yang berkolaborasi saling memiliki rasa saling percaya dalam pengelolaan sampah?

Aspek komitmen pada proses

Bagaimana tanggung jawab antar pihak dalam menjalankan kolaborasi pengelolaan sampah?

Aspek pemahaman bersama

Apakah dari antar pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai dalam pengelolaan sampah?

Aspek hasil akhir

Apa hasil yang diperoleh dari kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan sampah?

Apakah ada dilakukan evaluasi antar pihak yang berkolaborasi dari hasil yang diperoleh dalam pengelolaan sampah?

C. Informan Ketua RT 01 Dan RT 03 Huntap Tondo

1.starting condition (kondisi awal)

Bagaimana kondisi awal sebelum ada nya kolaborasi dalam pengelolaan sampah?

2.institutional design (desain kelembagaan)

Apakah ada aturan atau prosedur formal yang mengatur kolaborasi dalam pengelolaan sampah?

3.facilitative leadership (kepemimpinan fasilitatif)

Apakah anda mengetahui siapa yang berperan sebagai mediator dalam kolaborasi pengelolaan sampah?

4. collaborative process (proses kolaboratif)

Aspek dialog tatap muka

Apakah anda pernah dilibatkan dalam musyawarah pengambilan keputusan pengelolaan sampah?

Aspek membangun kepercayaan

Apakah anda memiliki rasa percaya terhadap pihak yang berkolaborasi dalam pengelolaan sampah?

Aspek komitmen pada proses

Menurut anda, apakah pihak yang kolaborasi memiliki rasa tanggung jawab?

Aspek pemahaman bersama

Menurut anda, seberapa jauh pemahaman pihak yang terlibat terkait tujuan yang ingin dicapai kolaborasi ini?

Aspek hasil akhir

Menurut anda, sejauh mana hasil yang diberikan dari kolaborasi ini?

Apakah ada evaluasi yang dilakukan terkait kolaborasi ini?

TRASNKIP WAWANCARA

Nama : Ibnu Mundzir, SP., M.Eng
 Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
 Informan : 1

No	Indikator	Daftar Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	<i>starting condition</i> (kondisi awal)	<p>Apa latar belakang munculnya kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan sampah?</p> <p>Bagaimana kondisi awal sebelum ada nya kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan sampah?</p>	<p>Ya, untuk kolaborasi dalam pengelolaan sampah di kelurahan tondo di latar belakangi karna kelurahan tersebut memiliki kepadatan penduduk yang tinggi yang berpengaruh juga dalam peningkatan jumlah produksi sampah apalagi di situ hanya memiliki 2 armada. Adapun sebelum kolaborasi ini di bentuk untuk sampah di kelurahan tondo di tangani langsung oleh masyarakat namun di tumpuk pada satu tempat sehingga memunculkan masalah baru, maka dari itu di bentuk lah kerja sama untuk mengatasi sampah tersebut walau masih ada sisa-sisa.</p>
2	<i>institutional design</i> (desain kelembagaan)	Apakah ada aturan atau prosedur formal yang mengatur kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan sampah?	Untuk aturan dalam kolaborasi ini mengacu pada perda provinsi Sulawesi tengah nomor 5 tahun 2021 tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan

			hidup. Dan untuk prosedur dalam kolaborasi masih berlandaskan pada aspek tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat.
3	<i>facilitative leadership</i> (kepemimpinan fasilitatif)	Siapa yang berperan sebagai mediator antar pihak yang berkolaborasi dalam pengelolaan sampah?	Dalam kolaborasi ini, ada beberapa pihak yang berperan sebagai mediator seperti korlur, dan RT/RW.
4	<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif)	<p>Aspek dialog tatap muka</p> <p>Seberapa sering proses komunikasi/dialog tatap muka di lakukan antar pihak yang berkolaborasi dalam membahas pengelolaan sampah?</p>	Ya, Ketika terjadi masalah maka kita turun sama-sama untuk mediskusi kan masalah tersebut. Selain itu, di kelurahan juga melakukan pertemuan rutin setiap sebulan sekali untuk membahas dan mengevaluasi terkait pengelolaan sampah yang melibatkan korcam, korlur, dan masyarakat. Adapun kami dari DLH akan ikut serta jika di beri undangan dating karena memang sudah ada korlur yang mengatasi masalah tersebut.
5	<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif)	<p>Aspek membangun kepercayaan</p> <p>Apakah antar pihak yang berkolaborasi saling memiliki rasa saling percaya dalam pengelolaan sampah?</p>	Iya, tentu saja kami saling percaya dalam kolaborasi pengelolaan sampah ini. Adapun belum optimal hal itu di karenakan kelurahan tondo yang cukup luas di tambah tingginya kepadatan penduduk serta terbatas nya transportasi mengangkut sampah.

6	<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif)	<p>Aspek komitmen pada proses</p> <p>Bagaimana tanggung jawab antar pihak yang berkolaborasi dalam menjalankan pengelolaan sampah?</p>	Komitmen yang kami pegang adalah jika ada permasalahan dalam pengelolaan sampah, kami pihak yang terlibat dalam kolaborasi ini akan menyelesaikannya bersama-sama, ya istilahnya sistem keroyokan.
7	<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif)	<p>Aspek pemahaman bersama</p> <p>Apakah dari antar pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai dalam pengelolaan sampah?</p> <p>Bagaimana pengambilan keputusan dalam pengelolaan sampah dilakukan apakah melalui musyawarah atau tidak?</p> <p>Apakah sering terjadi perbedaan pendapat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan sampah?</p>	Tentunya tujuan kami bersama adalah untuk menjadi kan kelurahan tondo bebas dari masalah sampah karena penilaian jalur terminal, laut taipa, dan Pelabuhan selalu melalui kelurahan tondo. Adapun pengambilan keputusan selalu melalui musyawarah di kelurahan yang kemudian di teruskan kepada DLH. Musyawarah kadang kala tidak berjalan dengan baik terutama terkait retribusi sampah sehingga harus mendiskusikan lebih mendalam untuk mencapai kesepakatan bersama.
8	<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif)	<p>Aspek hasil akhir</p> <p>Apa hasil yang di peroleh dari kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan sampah?</p> <p>Apakah ada dilakukan evaluasi antar pihak yang</p>	Hasil yang di peroleh dalam kolaborasi ini ditandai dengan berjalaninya TPS 3R naroso di kelurahan tondo untuk mendaur ulang sampah. Kami juga melakukan evaluasi terkait kolaborasi pengelolaan

		<p>berkolaborasi dari hasil yang di peroleh dalam pengelolaan sampah?</p> <p>Apakah terdapat hambatan dalam proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah?</p>	<p>sampah bahkan yang terbaru kemarin melalui lomba kelurahan mantap yang kemudian di jadikan bahan evaluasi untuk kelurahan. Adapun hambatan yang sering di temui adalah sering terjadi nya miskomunikasi serta keterbatasan sumber daya yang di miliki yang mengakibatkan kurang maksimal nya hasil dalam kolaborasi pengelolaan kelurahan tondo.</p>
--	--	---	---

Nama : Moh. Vikri A. Erwin S. Lamporo, S.STP

Jabatan : Kasi Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Informan : 2

No	Indikator	Daftar Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	<i>starting condition</i> (kondisi awal)	<p>Apa latar belakang muncul nya kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan sampah?</p> <p>Bagaimana kondisi awal sebelum ada nya kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan sampah?</p>	<p>Iya, untuk yang melatarbelakangi .kolaborasi ini karna kami melihat di kelurahan tondo ini masalah sampah sudah terlalu kompleks untuk di tangani sendiri apalagi di tambah dengan keluasan dan kepadatan penduduk di sini, maka dari itu kami melakukan kolaborasi dalam mengelola sampah supaya masalah sampah di sini bisa di atasi. Sebelum adanya kolaborasi kami di sini cukup kewalahan mengatasi</p>

			masalah sampah karena produksi sampah yang tinggi di tambah dengan terbatas nya armada sampah di kelurahan tondo adapun TPS 3R masih berjalan sendiri sehingga belum terlalu aktif seperti sekarang.
2	<i>institutional design</i> (desain kelembagaan)	Apakah ada aturan atau prosedur formal yang mengatur kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan sampah?	Terus terang saja kalau dibilang aturan formal yang atur kolaborasi ini nda terlalu jelas. Ada memang perwali dari kota soal kebersihan tapi kalau di tondo kita belum punya prosedur khusus, Adapun hanya sebatas SK yang berisikan nama pengurus dan program-program yang di jalankan.
3	<i>facilitative leadership</i> (kepemimpinan fasilitatif)	Siapa yang berperan sebagai mediator antar pihak yang berkolaborasi dalam pengelolaan sampah?	Kalau soal mediator, ya di sini yang banyak ambil peran itu kelurahan sendiri. Kita yang jadi penghubung antara pihak-pihak yang berkolaborasi. Biasanya kalau ada program atau kegiatan, informasi dan koordinasinya lewat kelurahan. Kadang juga kita minta bantuan RT/RW jadi penghubung di lapangan, karena mereka lebih dekat sama warga
4	<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif)	Aspek dialog tatap muka Seberapa sering proses	Untuk dialog tatap muka atau pertemuan kami di sini melakukan pada saat ingin

		komunikasi/dialog tatap muka di lakukan antar pihak yang berkolaborasi dalam membahas pengelolaan sampah?	menjalankan suatu program jadi di pertemuan kami membahas apa yang akan di jalankan serta apa-apa saja kendala yang mungkin di hadapi.
5	<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif)	<p>Aspek membangun kepercayaan</p> <p>Apakah antar pihak yang berkolaborasi saling memiliki rasa saling percaya dalam pengelolaan sampah?</p>	Kalau soal saling percaya sebenarnya ada tapi jujur masih naik-turun. Di awal kolaborasi semua semangat dan saling percaya tapi makin lama kalau ada janji yang nda ditepati atau tugas yang molor, ya mulai muncul rasa ragu. Ada juga pihak yang maunya jalan sendiri, nda mau terlalu ikut aturan bersama tapi kita selalu coba jaga komunikasi duduk rapat ketika ada masalah.
6	<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif)	<p>Aspek komitmen pada proses</p> <p>Bagaimana tanggung jawab antar pihak yang berkolaborasi dalam menjalankan pengelolaan sampah?</p>	soal komitmen di awal semangat, tapi makin lama beberapa pihak mulai jarang ikut kegiatan. Soal nya dana juga jadi tantangan, karena kegiatan pengelolaan sampah ini butuh biaya, sementara anggarannya terbatas.
7	<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif)	<p>Aspek pemahaman bersama</p> <p>Apakah dari antar pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan bersama yang ingin di capai dalam</p>	ya kalau tujuan bersama itu ada, kita semua mau Tondo ini bersih tidak ada lagi sampah numpuk di pinggir jalan serta lingkungan yang enak dipandang. Kalau di Tondo ini pengambilan

		<p>pengelolaan sampah?</p> <p>Bagaimana pengambilan keputusan dalam pengelolaan sampah di lakukan apakah melalui musyawarah atau tidak?</p> <p>Apakah sering terjadi perbedaan pendapat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan sampah?</p>	<p>keputusan soal pengelolaan sampah itu biasanya lewat musyawarah. Kita kumpul dikantor kelurahan, panggil RT/RW, perwakilan warga, sama pihak-pihak yang terlibat. Kita dengar semua masukan baru tentukan langkah yang mau diambil. ya perbedaan pendapat itu sering terjadi kalau kita rapat bahas pengelolaan sampah. Namanya juga banyak pihak yang terlibat, pasti ada saja yang beda pandangan. Tapi saya pikir itu wajar yang penting ujungnya kita bisa ambil keputusan yang disepakati bersama.</p>
8	<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif)	<p>Aspek hasil akhir</p> <p>Apa hasil yang di peroleh dari kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan sampah?</p> <p>Apakah ada di lakukan evaluasi antar pihak yang berkolaborasi dari hasil yang di peroleh dalam pengelolaan sampah?</p> <p>Apakah terdapat hambatan dalam proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah?</p>	<p>hasil dari kolaborasi ini dapat di lihat dari lingkungan tondo sekarang agak lebih bersih dibanding dulu, sampah yang numpuk di pinggir jalan sudah berkurang apalagi di titik-titik yang dulu parah. TPS 3R juga sudah mulai jalan walaupun belum maksimal tapi lumayan membantu. Adapun kami melakukan evaluasi itu bersamaan dengan adipura yang di lakukan di pertengahan tahun. hambatan itu pasti ada, kadang masalahnya di</p>

			komunikasi atau informasi dari satu pihak yang berkolaborasi tidak sampai ke pihak lain, jadi pekerjaan terlambat.
--	--	--	--

Nama : Ahnizar

Jabatan : Ketua TPS 3R Naroso

Informan : 3

No	Indikator	Daftar Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Strating condition (kondisi awal)	Bagaimana kondisi awal sebelum ada nya kolaborasi dalam pengelolaan sampah?	Sebelum ada nya TPS 3R sampah ada dimana-mana karena belum tempat pembuangan atau pemilahan dan juga dulu masyarakat tidak tau sampah itu ada nilai nya.
2	<i>institutional design</i> (desain kelembagaan)	Apakah ada aturan atau prosedur formal yang mengatur kolaborasi dalam pengelolaan sampah?	Untuk aturan dalam kolaborasi kita tidak ada,kami di sini hanya berlandaskan dengan perda kota palu nomor 3 tahun 2016
3	<i>facilitative leadership</i> (kepemimpinan fasilitatif)	Siapa yang berperan sebagai mediator dalam kolaborasi pengelolaan sampah?	yang biasa jadi mediator biasa lurah atau perangkat kelurahan mereka yang jadi penghubung antara masyarakat, TPS 3R, sama dinas terkait. Tapi kadang ketua TPS 3R juga berperan sebagai mediator dari masyarakat untuk meyampaikan keluh kesah.

4	<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif)	Aspek dialog tatap muka Seberapa sering proses komunikasi/dialog tatap muka di lakukan antar pihak yang berkolaborasi dalam membahas pengelolaan sampah?	Kalau untuk komunikasi seminggu bisa 2 kali tapi hanya dengan lurah atau pihak kelurahan tapi untuk komunikasi dengan pihak DLH hanya jika ada yang penting untuk di bahas.
5	<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif)	Aspek membangun kepercayaan Apakah dari pihak yang berkolaborasi saling memiliki rasa saling percaya dalam pengelolaan sampah?	Dalam pengelolaan sampah pihak-pihak yang berkolaborasi saling memiliki rasa percaya. ini bisa kita lihat dari kesediaan kelurahan, dinas lingkungan hidup berbagi peran dan terbuka dalam komunikasi.
6	<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif)	Aspek komitmen pada proses Bagaimana tanggung jawab antar pihak dalam menjalankan kolaborasi pengelolaan sampah?	Tentunya kita berusaha bagaimana sampah itu bisa berkurang namun kita selalu mengalami kendala dalam mengolah Kembali sampah seperti terbatas nya alat di sini.
7	<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif)	Aspek pemahaman bersama Apakah dari antar pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai dalam pengelolaan sampah?	pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi memang memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai, yaitu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, serta mengurangi volume sampah yang menumpuk di wilayah tondo. Dan juga menyadarkan warga bahwa sampah masih memiliki nilai
8	<i>collaborative</i>	Aspek hasil akhir	TPS 3R di sini pada tahun

	<p><i>process</i> (proses kolaboratif)</p>	<p>Apa hasil yang di peroleh dari kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan sampah?</p> <p>Apakah ada dilakukan evaluasi antar pihak yang berkolaborasi dari hasil yang di peroleh dalam pengelolaan sampah?</p>	<p>2021 saya akui belum maksimal dan masih banyak kekurangan seperti alat pengelolaan sampah, dan sekarang sejak DLH berkolaborasi bersama Kelurahan Tondo damparnya sekarang bisa dilihat TPS3R sekarang mulai berjalan maksimal dan juga masyarakat mulai sadar sampah bisa menghasilkan</p> <p>Evaluasi bersama itu dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk mengevaluasi kembali kinerja terkait pengelolaan sampah, Adapun hambatan itu sendiri itu dari masyarakat kurang pahamnya terkait pemilahan sampah.</p>
--	--	---	---

Nama : Baharuddin

Jabatan : RT 01 Huntap Tondo

Informan : 4

No	Indikator	Daftar Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	<p><i>starting condition</i> (kondisi awal)</p>	Bagaimana kondisi awal sebelum ada nya kolaborasi dalam pengelolaan sampah?	Sebelum ada kolaborasi itu, kondisi pengelolaan sampah di Tondo masih kacau. orang biasa cuman kumpul sampah di satu tempat, kadang buang sembarang di jalan jadi

			bikin kotor lingkungan.
2	<i>institutional design</i> (desain kelembagaan)	Apakah ada aturan atau prosedur formal yang mengatur kolaborasi dalam pengelolaan sampah?	Kalau ditanya soal aturan formal itu, kita sebagai RT di sini belum ada aturan yang tertulis. Biasanya kita cumin di himbaua dari kelurahan atau Dinas Lingkungan Hidup, tapi itu lebih kayak arahan biasa
3	<i>facilitative leadership</i> (kepemimpinan fasilitatif)	Apakah anda mengetahui siapa yang berperan sebagai mediator dalam kolaborasi pengelolaan sampah?	Tentu nya yang menjadi mediator dari pihak kelurahan
4	<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif)	Aspek Dialog Tatap Muka Apakah anda pernah dilibatkan dalam musyawarah pengambilan keputusan pengelolaan sampah?	Kalau untuk di libatkan musyawarah saya pernah, kita biasa melakukan rapat terkait pengelolaan sampah di balai kelurahan tondo.
5	<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif)	Aspek membangun kepercayaan Apakah anda memiliki rasa percaya terhadap pihak yang berkolaborasi dalam pengelolaan sampah?	Tentunya kami memberi rasa percaya kepada pihak yang berkolaborasi agar kelurahan tondo bisa bersih dari sampah.
6	<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif)	Aspek komitmen pada proses Menurut anda, apakah pihak yang kolaborasi memiliki rasa tanggung jawab?	Iya, karna bisa di lihat TPS 3R Naroso itu sudah berjalan dengan baik dan juga warga sudah mulai tidak buang sampah sembarangan walaupun tetap ada saja warga yang masih nakal.

7	<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif)	Aspek pemahaman bersama Menurut anda, seberapa jauh pemahaman pihak yang terlibat terkait tujuan yang ingin dicapai kolaborasi ini?	Pastinya itu tujuan nya untuk membuat kelurahan tondo bersih.
8	<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif)	Aspek hasil akhir Menurut anda, sejauh mana hasil yang diberikan dari kolaborasi ini? Apakah ada evaluasi yang dilakukan terkait kolaborasi ini?	Sangat terlihat hasil nya dari kolaborasi ini karena kelurahan tondo sekarang mulai kurang dari sampah yang di buang sembarang. untuk evaluasi saya sebagai RT belum pernah di libatkan dalam evaluasi.

Nama : Helmi

Jabatan : RT 03 Huntap Tondo

Informan : 5

No	Indikator	Daftar Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	<i>starting condition</i> (kondisi awal)	Bagaimana kondisi awal sebelum ada nya kolaborasi dalam pengelolaan sampah?	Dulu sebelum ada kolaborasi masyarakat di huntap sini buang sampah seenaknya dimana ada tumpukan sampah pasti di buangnya juga di situ
2	<i>institutional design</i> (desain kelembagaan)	Apakah ada aturan atau prosedur formal yang mengatur kolaborasi dalam pengelolaan sampah?	Untuk aturan resmi kolaborasi tidak ada saya cuman mengikuti arahan yang di berikan
3	<i>facilitative</i>	Apakah anda mengetahui	Yang menjadi mediator

	<i>leadership</i> (kepemimpinan fasilitatif)	siapa yang berperan sebagai mediator dalam kolaborasi pengelolaan sampah?	TPS 3R bersama kelurahan.
4	<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif)	<p>Aspek Dialog Tatap Muka</p> <p>Apakah anda pernah dilibatkan dalam musyawarah pengambilan keputusan pengelolaan sampah?</p>	Ya, pernah di adakan rapat terkait pengelolaan sampah yang melibatkan kelurahan tondo, TPS 3R, Dan juga RT
5	<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif)	<p>Aspek membangun kepercayaan</p> <p>Apakah anda memiliki rasa percaya terhadap pihak yang berkolaborasi dalam pengelolaan sampah?</p>	Rasa percaya kepada pihak yang berkolaborasi sangat percaya karena memiliki tujuan yang baik demi lingkungan kelurahan tondo
6	<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif)	<p>Aspek komitmen pada proses</p> <p>Menurut anda, apakah pihak yang kolaborasi memiliki rasa tanggung jawab?</p>	Bisa dilihat dari TPS 3R di hantap tahun 2021 TPS 3R masih berjalan dengan belum maksimal tapi semenjak pihak kelurahan tondo dan DLH kerja TPS 3R sudah mulai berjalan baik walaupun masih ada beberapa kendala
7	<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif)	<p>Aspek pemahaman bersama</p> <p>Menurut anda, seberapa jauh pemahaman pihak yang terlibat terkait tujuan yang ingin dicapai kolaborasi ini?</p>	Tujuan nya sudah pasti ingin membuat kelurahan tondo menjadi kurang dari sampah
8	<i>collaborative process</i> (proses kolaboratif)	Aspek hasil antara	Walaupun ada beberapa aspek yang belum

		<p>Menurut anda, sejauh mana hasil yang diberikan dari kolaborasi ini?</p> <p>Apakah ada evaluasi yang dilakukan terkait kolaborasi ini?</p>	maksimal tapi bisa di lihat kelurahan tondo sekarang mulai bersih sampah tidak berserakan dimana-mana.saya tidak pernah di libatkan dalam evaluasi
--	--	--	--

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

I. Umum

Pandangan masyarakat tentang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna dan belum menjadikannya sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan diharapkan dapat berubah. Pengelolaan sampah yang masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah adalah indicator dari pandangan tersebut.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir itu telah mulai ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi untuk energi, kompos, pupuk atau untuk bahan baku industri.

Pengelolaan sampah yang komprehensif dilaksanakan sejak dari hilir, hingga ke hilir, di mana sampah dapat dipilah, didaur ulang, dan dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan (reduce), penggunaan kembali (reuse), dan pendauran ulang (recycle). Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Oleh semangat perubahan atas cara pandang masyarakat itu, yang dilandasi oleh perubahan regulasi, pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dalam wilayah Kota Palu, sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan secara lebih khusus pula yang terkait pengelolaan sampah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, berdasarkan hierarki, adalah peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, Kota Palu telah mempunyai rencana induk (master plan) pengelolaan sampah yang terbit tahun 2014, setahun setelah Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah diterbitkan.

Sebagaimana uraian di atas, perubahan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Palu ini diperlukan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah di Kota Palu yang lebih baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah sampah di Kota Palu;
- c. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Kota Palu dalam pengelolaan sampah di Kota Palu; dan
- d. kejelasan hak dan kewajiban antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah di Kota Palu.

DOKUMENTASI

Informan 1: Ibnu Mundzir, SP., M.Eng selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

Kota Palu (14, juli, 2025)



Informan 2 : Moh. Vikri A. Erwin S. Lamporo, S.STP selaku Kasi Pemerintahan,

Ketentraman Dan Ketertiban Kelurahan Tondo (18, juli, 2025)



Informan 3 : Ahnizar selaku Ketua TPS 3R Naroso (07, agustus, 2025)



Informan 4 : Baharuddin selaku RT 01 Huntap Tondo (13, agustus, 2025)



Informan 5 : Helmi Selaku RT 03 Huntap Tondo (13, agustus, 2025)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Fitaqwa Prasni Ramadhan
Nomor Stambuk : B10121097
Tempat Tanggal Lahir: Tondo, 20, November, 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kompas Tondo
Nomor HP : 082188232817

**B. Identitas Orang Tua**

Bapak
Nama : Prasmaji
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kompas Tondo

Ibu
Nama : Rosmini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kompas Tondo

C. Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN Inti Tondo
Sekolah Menengah Pertama : SMP AL- Khairaat 1 Palu
Sekolah Menengah Atas : SMAN 5 Model Palu
Perguruan Tinggi : Universitas Tadulako